

**ANALISIS PREFERENSI PETANI CABAI
TERHADAP ASPEK KEBIJAKAN PERTANIAN KOMODITAS CABAI
DI KECAMATAN KEPUNG, KABUPATEN KEDIRI**

Oleh :

AHMAD ZULFIKAR ALFIANTO



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS PERTANIAN
MALANG
2019**

**ANALISIS PREFERENSI PETANI CABAI
TERHADAP ASPEK KEBIJAKAN PERTANIAN KOMODITAS CABAI
DI KECAMATAN KEPUNG, KABUPATEN KEDIRI**

Oleh

**AHMAD ZULFIKAR ALFIANTO
145040101111215**

PROGRAM STUDI AGRIBISNIS

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar
Sarjana Pertanian Strata Satu (S-1)**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA FAKULTAS PERTANIAN
JURUSAN SOSIAL EKONOMI PERTANIAN
MALANG
2017**

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul penelitian : Analisis Preferensi Petani Cabai Terhadap Aspek
Kebijakan Pertanian Komoditas Cabai di Kecamatan
Kepung, Kabupaten Kediri.

Nama Mahasiswa : Ahmad Zulfikar Alfianto
NIM : 145040101111215
Jurusan : Sosial Ekonomi Pertanian
Program Studi : Agribisnis

Disetujui

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping II,

Dr. Sujarwo, SP., MP.
NIP.197806032005011019

Ir. Nidamulyawaty Maarthen, M.Si
NIP 196401191992032002

Diketahui
Ketua Jurusan,

Mangku Purnomo, SP., M.Si.,
NIP.197704202005011001

LEMBAR PENGESAHAN

Mengesahkan
MAJELIS PENGUJI

Penguji I,

Penguji II,

Putri Budi Setyowati, SP., M.Sc.
NIK. 2016079003312001

Ir. Nidamulyawaty Maarthen, M.Si.
NIP. 197806032005011019

Penguji III,

Dr. Sujarwo, SP., MP
NIP. 197806032005011019

RINGKASAN

AHMAD ZULFIKAR ALFIANTO. 145040101111215. Analisis Preferensi Petani Cabai Terhadap Aspek Kebijakan Pertanian Komoditas Cabai di Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri. Di bawah bimbingan Dr. Sujarwo, SP., MP. M.Sc. Sebagai Pembimbing Utama dan Ir. Nidamulyawaty Maarthen, M.Si. Sebagai Pembimbing Pendamping.

Dalam sektor pertanian campur tangan pemerintah sangat dibutuhkan dalam membantu petani melakukan usahatannya, karena secara langsung maupun tidak langsung kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah akan berdampak kepada petani. Campur tangan pemerintah ini bisa dilakukan dalam tahap produksi, pemasaran, konsumsi, dan perdagangan. Campur tangan pemerintah bisa melalui kebijakan pertanian yang meliputi kebijakan produksi, kebijakan subsidi, kebijakan investasi, kebijakan harga, kebijakan pemasaran, dan kebijakan konsumsi. Komoditas yang memerlukan banyak campur tangan dari pemerintah salah satunya adalah cabai rawit, besarnya fluktuasi harga cabai rawit di Indonesia membuat pemerintah harus merumuskan suatu kebijakan yang tepat demi mendukung perkembangan sektor cabai. Sehingga kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah akan berdampak baik kepada petani.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang preferensi petani cabai terhadap kebijakan pertanian Desa Siman, Kabupaten Kediri. Agar kebijakan yang dibuat dapat memberikan pengaruh secara maksimal kepada petani. Sehingga dengan adanya penelitian ini dapat memberikan saran kepada pemerintah dalam membuat kebijakan pertanian, khususnya kebijakan untuk petani cabai. Responden dalam penelitian ini sebanyak 47 petani cabai dari total populasi 390 petani cabai. Tujuan penelitian ini dijawab dengan menggunakan alat analisis *conjoint*.

Dari hasil analisis kombinasi kebijakan terbaik berdasarkan tiap aspek yaitu kebijakan teknis usaha tani penyuluhan, kebijakan harga pupuk, dan kebijakan pembelian hasil pertanian. Hasil analisis juga menunjukkan aspek yang paling penting berturut turut adalah aspek teknis produksi 36.801%, aspek pasar 36.760%, dan terakhir adalah aspek ekonomi produksi 26.438%. Dari hasil Analisis *conjoint* tersebut mengindikasikan bahwa petani cabai di Desa Siman merasa perlu ada perbaikan dalam sistem teknis produksinya.

SUMMARY

AHMAD ZULFIKAR ALFIANTO. 145040101111215. Analisis Preferensi Petani Cabai Terhadap Aspek Kebijakan Pertanian Komoditas Cabai di Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri. Di bawah bimbingan Dr. Sujarwo, SP., MP. M.Sc. Sebagai Pembimbing Utama dan Ir. Nidamulyawaty Maarthen, M.Si. Sebagai Pembimbing Pendamping.

In the agricultural sector, government intervention is needed to help farmers do their farming, because directly or indirectly the policies issued by the government will have an impact to farmers. The government intervention can be carried out in the stages of production, marketing, consumption and trade. Government intervention can be through agricultural policies which include production policies, subsidy policies, investment policies, price policies, marketing policies, and consumption policies. Commodities that require a lot of government intervention is chilli, the fluctuations of chilli price in Indonesia has made the government formulate an appropriate policy to support the development of the chili sector. So that policies issued by the government will have a good impact on farmers.

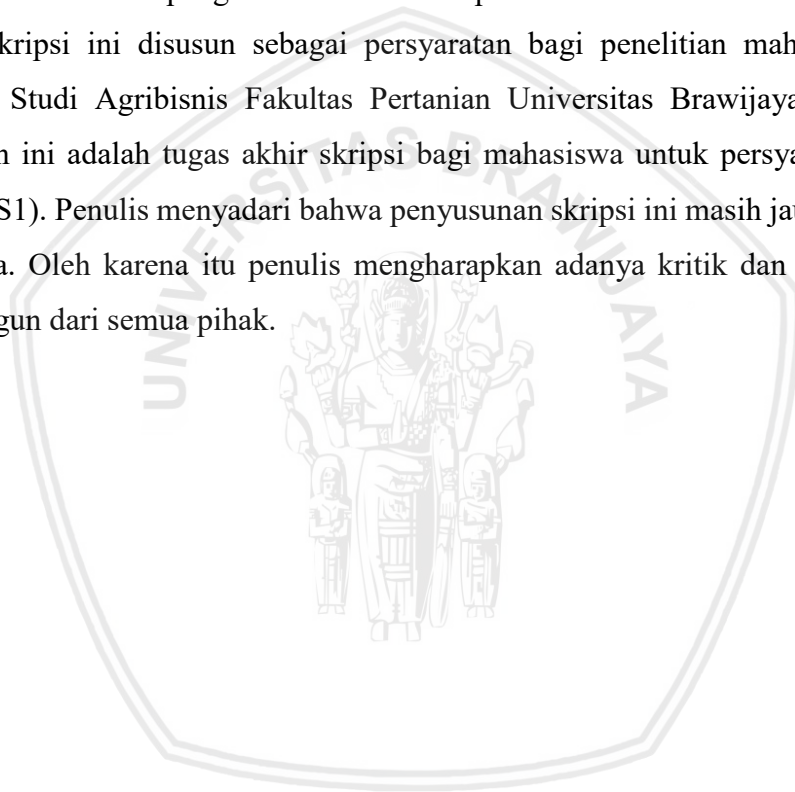
The purpose of this study is to analyze the preferences of chilli farmers to the agricultural policy in Siman Village, Kediri District. In order for the policy to be made can give maximum advantage to farmers. So that with this study can provide advice to the government in making agricultural policies, especially policies for chilli farmers. Respondents in this study are 47 chili farmers from a total population of 390 chili farmers. The purpose of this study is answer by using the conjoint analysis tool.

From the results of the analysis of the best policy combination based on each aspect, namely the technical policy of extension farming, fertilizer price policy, and the policy of purchasing agricultural products. The results of the analysis also show the most important aspects in a row are technical aspects of production 36.801%, market aspects 36.760%, and finally the economic aspects of production 26.438%. The results of the conjoint analysis indicate that chili farmers in Siman Village feel there needs to be improvement in the technical system of production.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil'alamin. Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas ridho, rahmat, dan karunianya sehingga penulis diberikan kesehatan dan kemudahan dalam mengerjakan skripsi ini yang berjudul “Analisis Preferensi Petani Cabai Terhadap Atribut Kebijakan Pertanian Komoditas Cabai Di Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri”. Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis preferensi petani mengenai kebijakan pertanian. Penelitian ini dilakukan di Desa Siman, Kecamatan Kepung, kabupaten Kediri yang merupakan salah satu penghasil cabai di Kabupaten Kediri.

Skripsi ini disusun sebagai persyaratan bagi penelitian mahasiswa S1, Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya. Kegiatan penelitian ini adalah tugas akhir skripsi bagi mahasiswa untuk persyaratan lulus strata 1 (S1). Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun dari semua pihak.



UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha esa, karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penyusunan skripsi terselesaikan sesungguhnya berkat bantuan pihak – pihak yang senantiasa tanpa rasa pamrih membantu baik secara moril maupun materil selama penelitian ini berjalan. Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Sujarwo, SP., MP. dan Ibu Ir. Nidamulyawaty, MSi selaku dosen pembimbing dalam penelitian dan penyusunan skripsi yang tidak kenal lelah untuk memberikan ilmunya kepada penulis sehingga mempermudah penulis dalam mengerjakan penelitian dan penyusunan skripsi
2. Kedua orang tua penulis yaitu Bapak Mahat dan Ibu Sri Eka Ningsih, serta keluarga besar penulis yang mendukung secara moril, materil dan do'a sehingga penulis pantang menyerah dalam mengerjakan penelitian dan penyusunan skripsi
3. Teman – teman diantaranya Muhammad Anandha Ramadhan, Ibnu batutha Muttaqin, Aden Fitra Jaya yang telah memberikah dukungan baik dalam hal diskusi maupun dukungan secara moral, dan seluruh teman-teman yang tidak bisa disebutkan namanya satu-persatu.
4. Hanifah Rohimaturramadhani yang telah menjadi penyemangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Petani cabai kecamatan Kepung kabupaten Kediri yang bersedia dalam membagikan ilmu dan pengalaman selama kegiatan penelitian
6. Bapak Suyono sekeluarga yang merupakan warga kecamatan Kepung yang telah bersedia membantu penulis dalam hal akomodasi dan dalam hal mencari petani cabai yang ada di kecamatan tersebut.
7. Serta pihak – pihak terkait seperti penyuluh dan instansi pemerintahan daerah yang bersedia dalam membagikan informasi petani jagung di wilayahnya dan diperbolehkan dalam melakukan kegiatan penelitian ini.

Sekian pengantar kata yang diucapkan penulis, dan penulis menyadari bahwasanya penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penuli berharap adanya kritik dan saran yang dapat membangun perbaikan lebih lanjut dimasa yang akan datang.

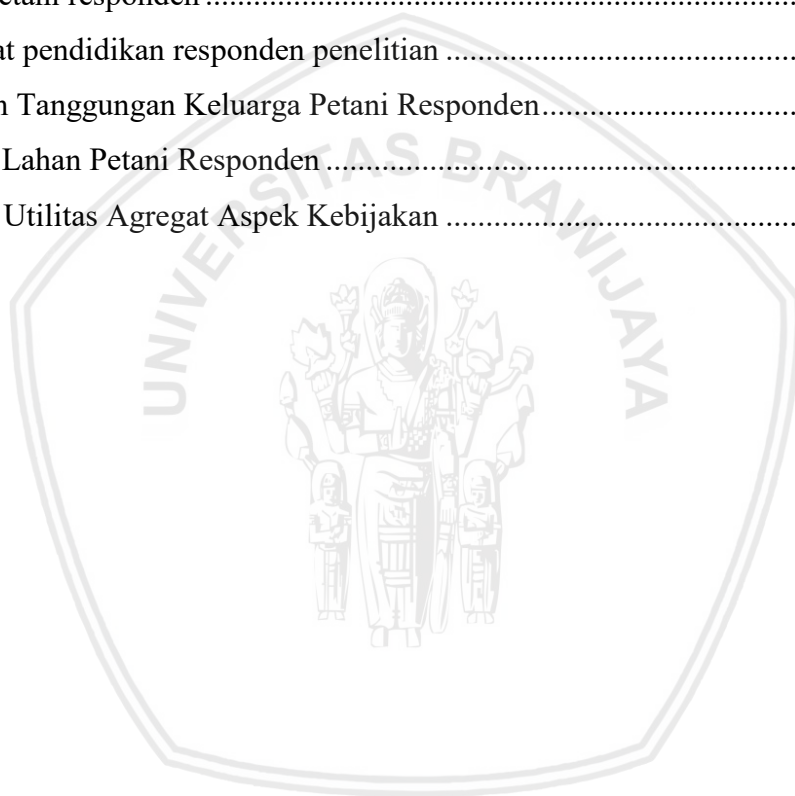
DAFTAR ISI

	Halaman
RINGKASAN	i
SUMMARY	ii
KATA PENGANTAR	iii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah.....	3
1.3 Batasan Masalah	4
1.4 Tujuan Penelitian.....	5
1.5 Kegunaan Penelitian	5
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu	6
2.2 Tinjauan Teoritis	8
2.2.1 Pembangunan Pertanian.....	8
2.2.2 Kebijakan	9
2.2.3 Kebijakan Pertanian	10
2.2.4 Kebijakan Harga Pertanian	12
2.2.5 Kebijakan Penyuluhan Pertanian	13
2.2.6 Cabai rawit	14
2.2.7 Pengertian Analisis <i>Conjoint</i>	15
2.2.8 Teori Preferensi dan Kaitannya Dengan Kebijakan.....	16
2.2.9 Teori Nilai guna	18
III. KERANGKA TEORITIS.....	20
3.1 Kerangka Pemikiran	20
3.2 Hipotesis	23
3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel	23

IV. METODE PENELITIAN	32
4.1 Pendekatan penelitian.....	
4.2 Metode Penentuan Lokasi dan Waktu.....	32
4.3 Metode Penentuan Responden	32
4.4 Metode Pengumpulan Data	34
4.5 Metode Analisis Data	35
V. PEMBAHASAN	39
5.1 Gambaran Umum	39
5.1.1 Letak Geografis dan Batas Wilayah.....	39
5.1.2 Penggunaan Lahan di Desa Siman.....	40
5.1.3 Distribusi Penduduk.....	41
5.2 Karakteristik Responden	43
5.3 Analisis Analisis Preferensi Petani Terhadap Aspek Kebijakan Pemerintah.....	46
5.3.1 Aspek Teknis Produksi	47
5.3.2 Aspek Ekonomi Produksi.....	48
5.3.3 Aspek Pasar.....	49
5.4 Implikasi Kebijakan Terhadap Preferensi Petani Cabai.....	51
5.4.1 Implikasi Kebijakan Aspek Teknis Produksi.....	51
5.4.2 Implikasi Kebijakan Aspek Ekonomi Produksi	52
5.4.3 Implikasi Kebijakan Aspek Ekonomi Produksi	52
VI. KESIMPULAN DAN SARAN	54
6.1 Kesimpulan.....	54
6.2 Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA	56
LAMPIRAN.....	60

DAFTAR TABEL

Nomor	Halaman
1. Atribut dan level yang digunakan dalam penelitian.....	36
2. Batas Wilayah Desa Siman, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri.....	40
3. Luas Wilayah Desa Siman Menurut Penggunaannya	41
4. Distribusi Penduduk Desa Siman Berdasarkan Jenis Kelamin	42
5. Distribusi Penduduk Desa Siman Berdasarkan Tingkat Pendidikan	43
6. Mata Pencarian di Desa Siman.....	44
7. Usia petani responden	45
8. Tingkat pendidikan responden penelitian	46
9. Jumlah Tanggungan Keluarga Petani Responden.....	46
10. Luas Lahan Petani Responden	47
11. Nilai Utilitas Agregat Aspek Kebijakan	51



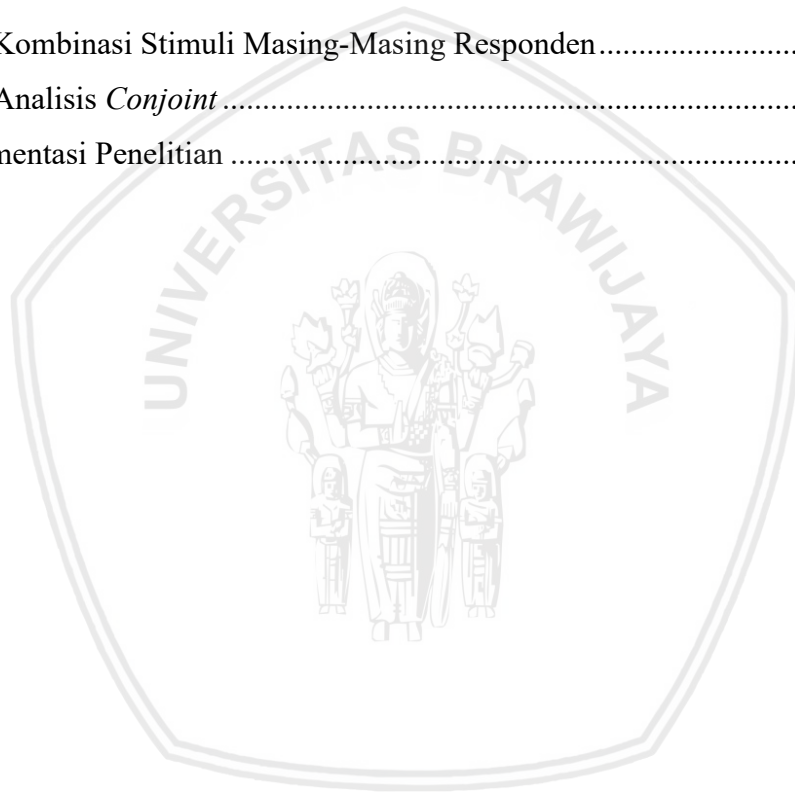
DAFTAR GAMBAR

Nomor	Halaman
1. Kerangka Pemikiran Perumusan Kebijakan Untuk Komoditas cabai Melalui analisis conjoin.....	22
2. Rata-rata Nilai Kepentingan Aspek Kebijakan (%).....	47



DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Halaman
1. Jumlah Produksi Cabai di Kabupaten Kediri Pada Tahun 2014-2016 Berdasarkan Kecamatan.....	61
2. Perhitungan Sampel	62
3. Peta Wilayah Desa Siman, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri.....	66
4. Kuisioner Penelitian	65
5. Skor Preferensi Petani.....	68
6. Macam-Macam Stimuli.....	73
7. Hasil Kombinasi Stimuli Masing-Masing Responden.....	75
8. Hasil Analisis <i>Conjoint</i>	79
9. Dokumentasi Penelitian	80



I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sektor pertanian merupakan sektor yang banyak membutuhkan campur tangan pemerintah melalui berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui kebijakan-kebijakan dalam bidang pertanian. Campur tangan pemerintah bisa dilakukan dalam tahap produksi, pemasaran, konsumsi, dan perdagangan (Tolley, 1982). Campur tangan pemerintah bisa melalui kebijakan pertanian yang meliputi kebijakan produksi, kebijakan subsidi, kebijakan investasi, kebijakan harga, kebijakan pemasaran, dan kebijakan konsumsi (Hanafie, 2010). Adapun Tujuan umum dari kebijakan pertanian adalah memajukan pertanian, mengusahakan agar sektor pertanian menjadi lebih produktif, produksi dan efisiensi produksi naik sehingga dapat meningkatkan tingkat kesejahteraan petani (Mubyarto, 1983). Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, pemerintah mengeluarkan peraturan-peraturan atau kebijakan tertentu, baik berbentuk Undang-undang, Peraturan-peraturan Pemerintah, Kepres, Kepmen, Keputusan Gubernur, dan lain-lain. Peraturan ini dapat dibagi menjadi dua kebijakan-kebijakan yang bersifat pengatur (*regulating policies*) dan pembagian pendapatan yang lebih adil merata (*distributive policies*) (Mubyarto, 1983).

Cabai rawit merupakan salah satu komoditas pertanian yang strategis karena banyak dicari oleh sebagian besar masyarakat Indonesia baik sebagai bahan baku produksi maupun sebagai penyedap rasa bagi makanan. Berdasarkan data resmi setjen pertanian tahun 2016, dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan produksi cabai rawit di Indonesia dalam kurun waktu 1980-2015, meskipun jumlah produksi berfluktuasi namun cenderung mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan per tahun sebesar 9,67 persen. Di Pulau Jawa rata-rata pertumbuhan per tahun selama 1980 – 2015 mengalami peningkatan sebesar 10,22% per tahun, dengan persentase rata-rata pertumbuhan produksi yang cukup besar terjadi pada tahun 1983, 1995 dan 2003 masing-masing naik sebesar 143,18 %, 68,14 % dan 50,74 % per tahun. Sementara itu produksi cabai di Luar Jawa rata-rata meningkat sebesar 12,00%. Penghasil cabai rawit Khususnya di Pulau Jawa ditempati Oleh provinsi Jawa Timur terdapat dengan rata-rata kontribusi produksi cabai rawit sebesar 31,03%. Peringkat kedua setelah Jawa Timur adalah Jawa Barat (14,89%),

Jawa Tengah (13,41%), Nusa Tenggara Barat (5,86%), Aceh (5,61%), Sumatera Utara (5,28%) dan Bali (3,08%) (Kementrian Pertanian, 2016).

Produksi cabai rawit dari tahun 2012-2015 cenderung fluktuatif tiap bulannya, pada tahun 2012 Produksi produksi cabai tertinggi yaitu pada bulan Mei kemudian setelah itu terus terjadi penurunan. Pada tahun 2013 produksi cabai rawit tertinggi yaitu pada bulan Juni yaitu sebesar 70.700 ton. Kemudian pada tahun 2014 produksi cabai rawit tertinggi terjadi di bulan Mei sebesar 85.200 ton. Pada tahun 2015 jumlah produksi tertinggi cabai rawit terjadi di bulan Mei sebesar 92.200 ton.

Kediri merupakan salah satu penghasil cabai di Jawa timur, Kediri berkontribusi sebesar 10,62% dari total produksi cabai di Jawa Timur. Kediri terdiri dari 26 kecamatan, kecamatan Kepung merupakan salah satu penghasil cabai di Kediri, pada tahun 2014 kecamatan Kepung memproduksi 10948 kuwintal cabai, kemudian meningkat pada tahun 2015 sebesar 40530 kuwintal, dan pada tahun 2016 kembali meningkat menjadi 42047 kuwintal. Kecamatan Kepung hanya kalah dari kecamatan Puncu dan kecamatan pagu.

Dalam sektor pertanian campur tangan pemerintah sangat dibutuhkan dalam membantu petani melakukan usahatannya, karena secara langsung maupun tidak langsung kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah akan berdampak kepada petani. Padahal informasi tentang kebijakan seperti apa yang diinginkan petani banyak diperlukan dalam beberapa hal. Pertama, informasi seperti itu penting dalam penilaian tingkat pengeluaran pemerintah untuk kebijakan semacam itu (Schokkaert dalam Mittenzwei, 2015). Kedua, kebijakan yang dibuat dapat lebih menargetkan kepada suatu kelompok petani di suatu wilayah. Ketiga dapat memahami bagaimana suatu preferensi petani terhadap kebijakan pemerintah dapat berubah seiring waktu karena perkembangan populasi dan perubahan lainnya di masyarakat (Variyam, Jordan dan Epperson dalam Mittenzwei, 2015).

Penelitian ini meneliti tentang preferensi petani cabai terhadap kebijakan pertanian. Agar kebijakan yang dibuat dapat memberikan pengaruh secara maksimal kepada petani. Sehingga dengan adanya penelitian ini dapat memberikan saran kepada pemerintah dalam membuat kebijakan pertanian, khususnya kebijakan untuk petani cabai.

1.2. Perumusan Masalah

Besarnya fluktuasi harga cabai rawit di Indonesia membuat pemerintah harus merumuskan suatu kebijakan yang tepat demi mendukung perkembangan sektor cabai. Berdasarkan data perkembangan harga cabai dari Januari tahun 2013 sampai September 2017 menunjukkan terdapat kecenderungan harga berfluktuasi. Pada bulan Januari 2017 harga cabai rawit mencapai lebih dari Rp.115.000, kemudian setelah itu turun sampai akhirnya pada bulan September 2017 harga turun sampai Rp.26.566. Fluktuasi harga cabai rawit tentu dapat membuat petani cabai merugi sewaktu-waktu, oleh karena itu pemerintah harus memberikan suatu kebijakan yang dapat memastikan segala kebutuhan petani cabai di Indonesia terpenuhi, terutama petani kecil yang membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah.

Kecamatan Kepung merupakan kecamatan yang menempati urutan keempat dari 26 kecamatan yang ada di Kediri. Sebagian besar warganya berprofesi sebagai petani, khususnya adalah petani cabai rawit, lahan yang ada di kecamatan ini terbagi menjadi 2 tipe yaitu adalah lahan sawah dan lahan tegalan, untuk lahan sawah sistem irigasinya merupakan irigasi teknis yang airnya berasal dari bendungan yang ada di kecamatan itu. Sementara untuk lahan tegalan, pengairan lahannya menggunakan sistem tadah hujan.

Pada proses pengambilan kebijakan pemerintah sering tidak melihat fakta-fakta di lapang dan cenderung mengabaikan keluhan dan pendapat petani. Hal tersebut tentunya menjadi permasalahan besar, karena setiap petani di suatu daerah tentunya memiliki permasalahan yang berbeda, dan tentunya memiliki cara penyelesaian yang berbeda pula tergantung pada kondisi lapang. Hal tersebut dapat membuat kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tidak tepat sasaran sehingga yang awalnya kebijakan dibuat untuk menyelesaikan masalah petani malah tidak dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Kebijakan yang dibuat pemerintah semestinya menyesuaikan dengan preferensi petani, karena dengan cara tersebut petani bisa merasakan dampak kebijakan secara maksimal.

Permasalahan terjadi tiap kali pemerintah melakukan kebijakan impor cabai, Kebijakan impor cabai. Bahkan sejak tahun 2009 terdapat peningkatan volume impor cabai segar sangat signifikan, sehingga volume impor melebihi volume ekspornya. Kendati pemerintah melakukan kuota impor cabai segar melalui pada

tahun 2012 dengan harapan tidak terjadi penurunan harga cabai secara fluktuatif, nyatanya tetap terjadi penurunan harga tersebut yang membuat petani merugi sehingga membiarkan cabai segar yang harusnya dipanen dibiarkan hingga membusuk. Kondisi ini perlu segera mendapat perhatian dari pemerintah, karena dapat merugikan petani dalam negeri terutama dalam masalah persaingan harga, yang selanjutnya dapat mengakibatkan turunnya minat petani cabai untuk terus berusaha di bidang pertanian sehingga produksi cabai lokal pun menurun, dan pada akhirnya justru mengakibatkan ketergantungan yang lebih jauh terhadap cabai impor (Maramis, 2018)

Fenomena di lapang menunjukkan bahwasannya banyak petani cabai di Desa Siman yang masih menggunakan metode-metode bercocok tanam yang didapat dari leluhurnya. Selain itu banyak juga yang mengaku masih belum pernah mendapat penyuluhan, pengembangan kemitraan, pengembangan teknologi pasca panen, dll. Padahal sejatinya kebijakan-kebijakan seperti di atas mampu meningkatkan SDM yang dimiliki petani. Dalam UU No. 16/2006 disebutkan bahwa penyuluhan pertanian berfungsi untuk menumbuhkan kemandirian petani, yang berarti meningkatkan kualitas SDM yang dimiliki petani. selain dalam aspek teknis, petani juga banyak mengeluhkan terkait harga cabai yang tidak pasti pada tingkat petani. Pemerintah harus lebih aktif dalam mendengar keluhan terkait permasalahan yang dihadapi oleh petani, terutama dari petani kecil demi mencapai kesejahteraan petani.

Berdasarkan dari perumusan masalah yang muncul, timbul pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana preferensi petani cabai terhadap aspek kebijakan-kebijakan pertanian?
2. Apakah kebijakan yang paling diinginkan oleh petani cabai?
3. Bagaimana implikasi kebijakan berdasarkan hasil analisis preferensi petani tebu?

1.3. Batasan Masalah

Berdasarkan hipotesis penelitian di atas, adapun batasan masalah yang dibuat untuk membatasi penelitian ini akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Kebijakan pertanian komoditas cabai yang dijadikan sebagai atribut adalah kebijakan yang meliputi aspek teknis produksi, aspek ekonomi produksi, aspek kelembagaan, dan aspek kemitraan yang didalamnya terdapat taraf pada masing-masing atributnya.
2. Penelitian ini menganalisis preferensi petani terhadap kebijakan yang selama ini dirasa tidak sesuai oleh petani cabai di Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri.

1.4. Tujuan Penelitian

1. Melakukan identifikasi karakteristik dari petani cabai di Desa Siman.
2. Mengetahui preferensi petani cabai terhadap atribut kebijakan pemerintah.
3. Merumuskan implikasi kebijakan berdasarkan hasil analisis preferensi petani cabai.

1.5. Kegunaan Penelitian

1. Sebagai bahan informasi bagi pemerintah terhadap pembuatan kebijakan.
2. Sebagai alat penyampaian informasi mengenai preferensi petani terhadap pembuat kebijakan yaitu pemerintah.
3. Sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Orazem, *et al* (1988) yang meneliti tentang preferensi petani terhadap kebijakan pertanian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan alat analisis LIBDEP. Data pendapat petani Iowa mengenai empat kebijakan pertanian: melanjutkan program saat ini yang menargetkan manfaat bagi petani secara fiskal, kontrol areal wajib, dan beralih ke pasar bebas. Hasilnya menunjukkan bahwa situasi keuangan petani, ukuran dan jenis operasi, pendidikan, dan pengalaman petani secara signifikan mempengaruhi pendapatnya. Sikap terhadap kontrol dan penargetan wajib sangat sensitif, dan sikap terhadap kelanjutan program saat ini paling tidak peka terhadap perubahan karakteristik ekonomi. Pengaman yang kuat dari kedua dukungan dan oposisi ditemukan untuk setiap kebijakan kecuali program saat ini.

Penelitian yang dilakukan oleh Bekele (2006) yang berjudul “Farmers’ Preferences for Development Intervention Programs: A Case Study of Subsistence Farmers from East Ethiopian Highlands”. Menggunakan metode survei preferensi, model logit, model regresi multivariate. Analisis logit multinomial preferensi Petani untuk intervensi pembangunan dibagi menjadi empat kategori utama: pasar, irigasi, pemukiman kembali, dan konservasi tanah dan air. Pengakuan dan pemahaman akan faktor-faktor tersebut, yang mempengaruhi penerimaan akseptabilitas, peringkat subyektif, diskriminasi subyektif. Kebijakan pembangunan untuk penerapan tingkat mikro, akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan perumusan kebijakan tingkat makro.

Penelitian yang dilakukan oleh Theresia (2014) yang berjudul “An Analysis of Farmers' Awareness of Agricultural Extension Devolution for Participatory Design of Agricultural Extension Programs in Kenya”. Menggunakan analisis Dalam metode Revealed Preference (RP) dan metode Stated Preference (SP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa di antara komponen kebijakan yang sangat disukai merupakan program penyuluhan termasuk keterampilan penyuluhan tentang peternakan dan perikanan dan pertanian hortikultura; kegiatan hubungan tambahan di ladang petani; dan evaluasi terjadwal dan peninjauan program penyuluhan.

Mekanisme harus diberlakukan untuk memungkinkan dan memudahkan partisipasi petani dalam proses merancang program penyuluhan.

Penelitian yang dilakukan oleh Anwarudin, *et al* (2015) yang berjudul *Dinamika Produksi Dan Volatilitas Harga Cabai: Antisipasi Strategi Dan Kebijakan Pengembangan* yang ada dikarenakan masalah fluktuasi harga yang terjadi hampir setiap tahun akan tetapi belum ada solusi yang konkret dari pemerintah. Petani cabai umumnya memiliki modal yang terbatas sehingga sulit menerima dan menerapkan inovasi teknologi yang memerlukan biaya cukup tinggi, walaupun tingkat keberhasilan dan keuntungan cukup besar. Sebagian petani yang tergabung dalam kelompok tani (gapoktan) di beberapa daerah penghasil cabai sudah ada yang menjalin kerja sama dengan perusahaan pengolah cabai. Harga kontrak yang ditetapkan perusahaan tersebut lebih besar daripada harga pasar. Apabila harga pasar lebih tinggi dari harga kontrak maka perusahaan akan memberikan insentif kepada petani sebesar 50% dari selisih harga pabrik dengan harga pasar. Strategi untuk mengatasi gejolak harga cabai antara lain dengan meningkatkan luas tanaman cabai pada musim hujan, mengatur luas tanam dan produksi cabai pada musim kemarau, menstabilkan harga, dan mengembangkan kelembagaan kemitraan yang handal dan berkelanjutan.

Penelitian yang dilakukan oleh Yulianjaya dan Hidayat (2016) yang meneliti tentang *Pola Kemitraan Petani Cabai Dengan Juragan Luar Desa (Studi Kasus Kemitraan di Desa Kucur, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang)*. Penelitian ini ada dikarenakan adanya permasalahan dimana petani di desa tersebut kurang tersentuh akses permodalan dari pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif, hasilnya menunjukkan bahwa pola kemitraan antara juragan dari luar desa dengan petani mitra di Desa Kucur cenderung menggunakan pola kerjasama operasional agribisnis (KOA). Juragan menjalin hubungan yang baik dengan petani mitranya di Desa Kucur dengan cara melakukan komunikasi yang baik dengan petani mitra di desa Kucur. Alasan petani memilih bermitra dengan juragan karena juragan dapat memenuhi seluruh kebutuhan permodalan untuk usaha taninya, proses peminjaman modal lebih mudah dengan adanya perantara, dan kesediaan jurnal memberikan modal kepada petani mitranya yang sedang dalam masa sulit.

Penelitian yang dilakukan oleh Maramis (2018) yang berjudul Dampak Impor Cabai Dari Tiongkok Terhadap Perekonomian Indonesia Tahun 2010-2015. Dalam hasil penelitian tersebut ditemukan hasil bahwa dampak dari kebijakan impor cabai dapat merugikan petani secara langsung dengan adanya perdagangan bebas. Sementara itu dengan semakin deras nya arus globalisasi, maka semakin tinggi pula jumlah cabai yang masuk ke Indonesia dari negara-negara yang tergabung dalam perdagangan bebas ini, baik dari segi jenis maupun volume yang semakin banyak.

Yang membedakan penelitian ini dengan keenam penelitian di atas adalah penelitian ini menggunakan analisis *conjoint* sebagai analisisnya, sementara dari kelima tersebut tidak menggunakan analisis *conjoin*. Kemudian yang selanjutnya adalah tempat, dari ketiga penelitian di atas dilakukan di luar Indonesia, sementara penelitian ini dilakukan di Indonesia, khususnya di kecamatan Kepung, kabupaten Kediri, Jawa Timur.

2.2. TINJAUAN TEORITIS

2.1.1. Pembangunan Pertanian

Strategi pembangunan nasional menjadikan sektor pertanian sebagai pilar utamanya sehingga mencakup bidang yang sangat luas, baik dari sisi social, ekonomi, budaya dan ekologi yang tentunya membutuhkan penanganan yang lebih intensif daripada sector lain. Sebagai sektor strategis, sektor pertanian mempunyai peran langsung maupun tidak langsung dalam menunjang perekonomian nasional. Oleh sebab itu, pembangunan sektor pertanian berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat pertanian yang mengacu pada sasaran pembangunan jangka panjang (Arifin, 2003). Menurut A.T. Mosher (dalam Banoewidjojo, 1983) ada beberapa syarat yang harus ada dalam pembangunan pertanian menjadi 2, yaitu:

- a. Syarat mutlak:
 1. Adanya pasar untuk menjual hasil tani
 2. Teknologi yang selalu berkembang
 3. Tersedianya bahan-bahan dan alat produksi secara mandiri (local)
 4. Adanya perangsang bagi industry pertanian
 5. Tersedianya sarana transportasi dan pendistribusian yang lancar dan berkelanjutan

- b. Syarat pelancar
 - 1. Pendidikan pembangunan
 - 2. Kredit untuk biaya produksi
 - 3. Kegiatan gotong-royong antar petani
 - 4. Perbaikan dan perluasan lahan untuk pertanian
 - 5. Perencanaan nasional untuk pembangunan pertanian

Pembangunan pertanian diarahkan pada pertanian yang maju, efisien dan tangguh. Pengertian maju, efisien dan tangguh dalam ekonomi pertanian menurut Mubyarto (1989) yang mencakup konsep-konsep mikro maupun makro, yaitu bagi sektor pertanian sendiri maupun dengan sektor-sektor lain diluar pertanian, misalnya industri, perdagangan, transportasi dan keuangan/ perkreditan. Selanjutnya pembangunan pertanian bertujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi, meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani, peternak dan nelayan, memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha, menunjang pembangunan industri serta meningkatkan ekspor, atau dalam garis besar pembangunan pertanian adalah untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

2.1.2. Kebijakan

Tujuan suatu kebijakan dibuat adalah mengatur kehidupan masyarakat untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Menurut Luankali (2007) kebijakan merupakan ilmu tentang hubungan antara pemerintah dengan warga negara atau apa yang dibuat oleh pemerintah adalah riil untuk warga negara. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah bukanlah untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk kepentingan bersama yaitu masyarakat. Menurut Woll (dalam Tangkilisan, 2003) kebijakan merupakan aktivitas pemerintah untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di masyarakat baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Berdasarkan definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan merupakan tindakan atau keputusan yang dibuat oleh pemerintah yang diharapkan dapat memberikan pengaruh baik bagi kehidupan masyarakat luas.

Kebijakan merupakan suatu tindakan yang mengarah kepada tujuan tertentu dan bukan hanya sekedar keputusan untuk melakukan sesuatu. Kebijakan seharusnya diarahkan pada apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dan bukan

sekedar apa yang ingin dilakukan oleh pemerintah, dengan kata lain suatu kebijakan harus melihat bagaimana kondisi nyata di dalam masyarakat. Menurut Brian W. Hogwood and Lewis A. Gunn (dalam Tangkilisan, 2003) secara umum kebijakan dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

1. Proses pembuatan kebijakan merupakan kegiatan perumusan hingga dibuatnya suatu kebijakan.
2. Proses implementasi merupakan pelaksanaan kebijakan yang sudah dirumuskan.
3. Proses evaluasi kebijakan merupakan proses mengkaji kembali implementasi yang sudah dilaksanakan atau dengan kata lain mencari jawaban apa yang terjadi akibat implementasi kebijakan tertentu dan membahas antara cara yang digunakan dengan hasil yang dicapai.

2.1.3. Kebijakan Pertanian

Sektor pertanian merupakan suatu sektor yang didalamnya terdapat intervensi dari pemerintah, intervensi dapat berupa biaya usaha tani, biaya konsumen, pajak, maupun dalam hal teknis pertanian. Sehingga nantinya dalam perumusan kebijakan pertanian membutuhkan banyak informasi terkait social budaya dalam suatu wilayah pertanian (Schokkaert., 1987). Menurut M. Rondhi (2016) Terdapat beberapa dasar utama pentingnya kebijakan pertanian antara lain:

1. Besarnya tenaga kerja yang berkecimpung dalam sektor pertanian, terutama di negara berkembang.
2. Sektor pertanian merupakan ssektor yang menyumbang devisa negara terbesar, lebih besar dari sektor industri
3. Sulitnya transfer tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor non-pertanian.

Tujuan kebijakan pertanian tidak hanya untuk meningkatkan produksi, akan tetapi hal yang lebih penting adalah pembangunan manusia itu sendiri, untuk membantu mereka memenuhi kebutuhan dasarnya dengan mandiri. Meningkatkan pendapatan keluarga pedesaan merupakan hal yang mendasar untuk mencapai tujuan tersebut, dan pada akhirnya menekankan pada peningkatan produktivitas dan memberikan harga yang tepat pada tingkat petani.

Kebijakan pertanian berkaitan dengan kebijakan ekonomi seara umum, sudah banyak negara-negara yang mengembangkan sistem campuran. Kebijakan pertanian

sendiri merupakan upaya pemerintah dalam melakukan pengembangan dalam sektor pertanian dimana didalamnya terdapat banyak sektor yang tergantung kepada sektor pertanian. Graham hallet (1971) mengemukakan bahwa kebijakan pertanian dapat dibagi menjadi 3, yaitu:

1. Kebijakan Pemasaran

Kebijakan ini berkaitan dengan perubahan rantai distribusi antara petani dan konsumen, sehingga pemerintah melakukan intervensi didalamnya. Tujuan kebijakan pemasaran adalah untuk memperkuat posisi petani dalam hal penawaran hasil panennya, misalnya dengan mendorong pengembangan suatu organisasi pemasaran yang dapat dikendalikan langsung oleh petani. Kebijakan pemasaran juga dapat berupa bantuan peningkatan kualitas produk petani atau mengurangi biaya pemasaran.

2. Kebijakan harga

Kebijakan harga merupakan suatu kebijakan yang berkaitan dengan harga yang diterima petani untuk hasil panen atau produknya dan harga lain pada rantai produksi usaha taninya. Kebijakan harga berkaitan dengan stabilisasi harga secara umum dan memiliki tujuan utama untuk meningkatkan pendapatan petani. Dengan meningkatkan pendapatan petani, maka dapat menjadi sarana sementara untuk mengurangi masalah kesenjangan pendapatan. Kebijakan harga sendiri bisa berupa kebijakan secara nasional ataupun internasional. Terdapat banyak metode yang bisa dilakukan dalam kebijakan harga seperti pemberlakuan tarif atau retribusi barang import, kuota import, dukungan pembelian, pengendalian produksi, organisasi pemasaran, subsidi, dan dapat melakukan kombinasi beberapa metode tersebut. Kebijakan harga pertanian umumnya bersifat untuk perlindungan, tidak terbatas pada produk pertanian dan banyak negara yang melakukan perlindungan pada industri manufaktur ataupun industri dengan skala besar.

3. Kebijakan Struktural

Dalam kebijakan struktural, pemerintah dapat merancang strategi untuk memperbaiki struktur pertanian seperti tata letak, produksi pertanian, alat dan mesin pertanian, serta infrastruktur desa termasuk pendidikan, penyediaan air minum, fasilitas sosial di pedesaan, dan pemberdayaan dalam arti yang luas.

2.1.4. Kebijakan Harga Pertanian

Harga menjadi salah satu indikator kinerja pasar, termasuk pada komoditas pertanian. Kementerian Perdagangan sebagai instansi pemerintah memiliki peran yang penting dalam menciptakan iklim perdagangan komoditas pertanian yang efisien dan memperhatikan kepentingan produsen dan konsumen. Kebijakan harga pertanian merupakan suatu kebijakan yang bersifat spesifik komoditas. Setiap kebijakan hanya diterapkan pada satu komoditas (misalnya, cabai). Kebijakan harga juga dapat mempengaruhi terhadap input pertanian, setiap kebijakan harga pertanian akan menimbulkan dampak baik pada produsen ke konsumen untuk komoditas bersangkutan, maupun anggaran pemerintah, atau sebaliknya. Beberapa kebijakan harga hanya mempengaruhi dua dari ketiga kelompok tersebut, sementara instrumen yang lain mempengaruhi seluruh dari ketiga kelompok tersebut (Aziza, 2009). Suatu kebijakan biasanya memiliki dampak positif maupun negatifnya sendiri, secara umum biasanya terdapat suatu kelompok yang mendapatkan kerugian dari kebijakan tersebut dan kelompok yang lain mendapatkan manfaat dari kebijakan yang dibuat. Ada tiga jenis instrumen kebijakan yang umum diterapkan yaitu, pajak dan subsidi, hambatan perdagangan internasional, dan pengendalian langsung (direct controls).

1. Pajak dan subsidi terhadap suatu komoditas pertanian menyebabkan terjadinya transfer antara anggaran negara (publik) dengan penerima kebijakan baik produsen maupun konsumen. Dalam hal pajak, transfer sumberdaya mengalir kepada pemerintah sementara dalam hal subsidi transfer sumberdaya berasal dari pemerintah.
2. Hambatan perdagangan internasional adalah pajak atau kuota yang sifatnya membatasi impor atau ekspor, Dengan melakukan hambatan perdagangan, instrumen kebijakan harga ini merubah tingkat harga dalam negeri, hambatan impor dapat menaikkan harga komoditas pertanian dalam negeri (Aziza, 2009). Sebagai contoh, pemerintah menetapkan kebijakan tarif (ad valorem) impor gula sebesar 25% untuk melindungi produk gula lokal dalam negeri selain itu dapat juga diberlakukan SNI sebagai hambatan impor. Sementara hambatan ekspor menurunkan harga dalam negeri menjadi lebih rendah dibandingkan dengan harga dunia. Contohnya, penurunan pajak

ekspor CPO menjadi nol persen bertujuan untuk mengurangi hambatan ekspor, yang sebelumnya pajak ekspor CPO sebesar 7,5 %7.

2.1.5. Kebijakan Penyuluhan Pertanian

Penyuluh pertanian merupakan suatu pendidikan non formal yang ditujukan kepada petani beserta keluarganya yang memiliki dua tujuan utama yang diharapkannya. Tujuan jangka pendeknya adalah menciptakan perubahan perilaku termasuk di dalamnya sikap, tindakan dan pengetahuan kearah yang lebih baik. Sementara untuk tujuan jangka panjangnya adalah meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat dengan cara meningkatkan taraf hidup mereka (Sastraatmadja, 1993). Sementara menurut Van Den Ban dan Hawkins (1999). Penyuluhan merupakan keterlibatan suatu individu untuk berkomunikasi secara sadar yang bertujuan untuk membantu sesamanya memberikan pendapat sehingga dapat membuat keputusan yang benar.

Menurut UUD No. 16 Tahun 2006 Tentang Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan menimbangi:

1. Bahwa penyuluhan sebagai bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum merupakan hak asasi warga negara Republik Indonesia.
2. Bahwa pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan yang berkelanjutan merupakan suatu keharusan untuk memenuhi kebutuhan pangan, papan, dan bahan baku industri; memperluas lapangan kerja; dan lapangan berusaha; meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya petani, perkebun, peternak, nelayan, pembudi daya ikan, pengolah ikan, dan masyarakat didalam dan sekitar kawasan hutan; mengentaskan masyarakat dan kemiskinan khususnya di perdesaan meningkatkan pendapatan nasional; serta menjaga kelestarian lingkungan.
3. Bahwa untuk lebih meningkatkan peran sector pertanian, perikanan dan kehutanan diperlukan sumberdaya manusia yang berkualitas, serta berkemampuan manajerial, kewirausahaan dan organisasi berbasis sehingga pelaku pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan mampu membangun usaha dari hulu ke hilir yang berdaya saing tinggi dan mampu

berperan serta dalam melestarikan hutan dan lingkungan hidup sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

4. Bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud dalam no 1,2,3 pemerintah berkewajiban menyelenggarakan penyuluhan dibidang pertanian, perikanan dan kehutanan.
5. Bahwa pengaturan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan dewasa ini masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang- undangan sehingga belum dapat memberikan dasar hukum yang kuat dan lengkap bagi penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.

2.1.6. Cabai Rawit

Cabai rawit merupakan salah satu komoditas yang memiliki posisi penting dalam pola konsumsi makanan, dalam hal ini cabai rawit bisa menjadi sayuran maupun sebagai bumbu masakan sehari-hari (Rukmana, 2002). Cabai rawit sendiri merupakan tanaman yang berasal dari Amerika Serikat, dan pada abad 16 mulai masuk ke Asia Tenggara termasuk ke Indonesia. Pada awalnya cabai rawit hanya terkonsentrasi di beberapa dataran tinggi di Pulau Jawa. Kini cabai rawit dapat dijumpai di berbagai daerah di Indonesia baik itu dataran tinggi, menengah, maupun rendah.

Taksinimi Tanaman cabai adalah sebagai berikut menurut Rukmana (2002):

Kingdom	: Plantae
Divisi	: Spermatophyta
Subdivisi	: Angiospermae
Kelas	: Dicotyledonae
Sub kelas	: Sympetalae
Ordo	: Tubiflorae
Famili	: Solanaceae
Genus	: Capsicum
Spesies	: Capsicum annum L

Cabai memiliki system perakaran yang menyebar, diawali dengan akar tunggang kemudian cabang-cabang akar, dan secara terus menerus tumbuh akar

serabut. Tanaman cabai memiliki 2 macam batang batang utama dan percabangan (batang skunder). Batang utama berwarna coklat hijau dengan panjang antara 20-28 cm dan tumbuh tegak berkayu pada pangkalnya. Percabangan berwarna hijau dengan panjang antara 5-7 cm, cabang terdiri dari cabang biasa, ranting, dan cabang wiwilan atau tunas liar. Daun tanaman ini terdiri dari alas tangkai, tulang dan helaian daun. Panjang tangkai daun antara 2-5 cm, berwarna hijau tua. Helaian daun bagian bawah berwarna hijau terang, sedangkan permukaan atasnya berwarna hijau tua. Daun mencapai panjang 10-15 cm, lebar 4-5 cm. Bagian ujung dan pangkal daun meruncing dengan tepi rata. Untuk bunganya tumbuh tunggal dari ketiak daun dan ujung ruas, struktur bunga memiliki 5-6 helai mahkota bunga, 1 putik, 5 helai daun bunga, dan 5-8 helai benang sari. Buah cabai rawit memiliki bentuk bervariasi mulai dari lonjong hingga berbentuk bulat, warna buah biasanya hijau sampai kuning keputih-putihan, tetapi setelah matang akan berubah warna menjadi merah tua atau merah muda (Nawangsih, 2003 dan Rukmana, 2002).

2.1.7. Pengertian Analisis Conjoint

Kata *conjoint* diturunkan dari kata *to conjoint* yang berarti *joined together* atau bekerja sama. Berbeda dari teknik analisis multivariate lainnya yang biasanya mengembangkan sebuah skor dari beberapa individu, analisis *conjoint* mengembangkan sebuah model preferensi untuk setiap individu (Gudono, 2011). Sedangkan Menurut Mattjik (2002) Analisis *conjoint* adalah sebuah teknik analisis guna mengukur preferensi konsumen terhadap variable (spesifikasi atau fitur) sebuah produk atau jasa.

Hasil dari analisis *conjoint* berupa informasi kuantitatif yang dapat memodelkan preferensi konsumen untuk beberapa kombinasi suatu produk. Tujuan dari analisis *conjoint* ini adalah memperoleh skor kegunaan (*utility*) yang dapat mewakili kepentingan setiap produk, sehingga dari skor tersebut dapat ditarik kesimpulan tentang variable apa yang dipertimbangkan konsumen dalam memilih suatu produk (Mattjik, 2002).

Menurut Green *et al* (1999) analisis dari *conjoint* ini dapat dimanfaatkan untuk:

1. Merancang harga
2. Memprediksi tingkat suatu penjualan atau penggunaan produk (*market share*), uji coba konsep produk baru
3. Segmentasi preferensi
4. Merancang strategi promosi

2.1.8. Teori Preferensi dan Kaitannya Dengan Kebijakan

Preferensi merupakan hal yang lebih diinginkan/diutamakan oleh seseorang. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia preferensi konsumen adalah hak untuk didahulukan dan diutamakan daripada yg lain; prioritas; pilihan; kecenderungan; kesukaan. Menurut Porteus (dalam Saputra, 2000), Preferensi adalah bagian dari komponen individu dalam membuat keputusan. Dan komponen-komponen tersebut adalah Persepsi, sikap, nilai, Kecenderungan, dan kepuasan. Komponen tersebut saling mempengaruhi seseorang dalam pengamengambilan suatu keputusan. Setiap individu memiliki preferensi dalam menentukan berbagai pilihan untuk kebutuhannya. Bilson (2004) mengungkapkan bahwa preferensi dapat dibentuk melalui pola pikir konsumen (individu) yang didasari oleh 2 hal, yaitu pengalaman yang diperolehnya dan kepercayaan turun temurun. Karena objek dari penelitian ini adalah petani cabai, maka dapat disimpulkan bahwa preferensi petani merupakan hal-hal (kebijakan) apa saja yang lebih diutamakan berdasarkan kebutuhan petani. Preferensi sendiri dapat dibedakan menjadi dua yaitu preferensi berdasarkan sikap dan preferensi berdasarkan atribut. Preferensi berdasarkan sikap terbentuk karena adanya kebiasaan dalam memilih beberapa produk, preferensi berdasarkan sikap ini terbentuk karena adanya perilaku yang berulang-ulang dan sudah menjadi kebiasaan yang telah berlangsung lama dan telah menjadi memori jangka panjang pada individu tersebut. Sementara preferensi berdasarkan atribut merupakan preferensi yang terbentuk berdasarkan perbandingan atribut dari dua atau lebih produk, dengan melihat kegunaan dan kemampuan pengguna berdasarkan produk tersebut (Kardes 2002).

Preferensi konsumen berkaitan erat dengan pemilihan suatu hal oleh masing-masing individu dalam hal ini adalah konsumen. Menurut Nicholson (2002) hubungan preferensi konsumen dapat di asumsikan dengan tiga sifat dasar, antara lain:

1. Kelengkapan

Apabila X dan Y adalah dua kondisi berbeda, maka setiap individu konsumen harus memberikan spesifikasi sebagai berikut:

- a. X lebih disukai daripada Y
- b. Y lebih disukai daripada X
- c. X dan Y sama-sama disukai

2. Transivitas

Apabila ada seseorang yang mengatakan bahwa dia lebih menyukai X daripada Y, dan lebih menyukai Y daripada Z, maka ia lebih menyukai X daripada Z

3. Kontinuitas

Apabila ada seseorang yang mengatakan lebih menyukai X daripada Y, maka jika ada situasi yang mirip dengan X harus disukai daripada Y. Dari perumpamaan tersebut dapat diasumsikan bahwa setiap individu dapat membuat ataupun menyusun urutan dalam semua kondisi dan situasi, mulai dari yang paling disukai sampai dengan yang paling tidak disukai berdasarkan alternative pilihan yang ada, maka seseorang akan lebih cenderung menyukai sesuatu yang dianggap dapat memuaskan kepuasannya.

Preferensi petani dalam kebijakan pertanian sangatlah diperlukan, karena petani adalah pengguna kebijakan sehingga secara langsung main tidak langsung akan memberikan dampak kepada kehidupan social, ekonomi, dan lingkungan dari petani. Ada beberapa alasan kenapa pembuat kebijakan (pemerintah) harus mengetahui preferensi dari petani. Pertama, informasi seperti itu penting dalam penilaian tingkat pengeluaran pemerintah untuk kebijakan semacam itu (Schokkaert dalam Mittenzwei, 2015). Kedua, kebijakan yang dibuat dapat lebih menargetkan kepada suatu kelompok petani di suatu wilayah. Ketiga dapat memahami bagaimana suatu preferensi petani terhadap kebijakan pemerintah dapat berubah seiring waktu karena perkembangan populasi dan perubahan lainnya di masyarakat (Variyam, Jordan dan Epperson dalam Mittenzwei, 2015). Dari penjabaran di atas, ternyata pentingnya mengetahui preferensi petani terhadap kebijakan tidak hanya akan berdampak kepada pihak petani itu sendiri, tetapi juga

akan berdampak kepada pemerintah dalam mengatur penggunaan anggaran dalam setiap kebijakan.

2.1.9. Teori Nilai Guna

Nilai guna atau utilitas merupakan sesuatu yang menggambarkan tentang kegunaan suatu barang yang dikonsumsi oleh seseorang. Jika suatu kebijakan memiliki nilai guna yang tinggi maka semakin tinggi pula keinginan petani akan adanya kebijakan tersebut, dan sebaliknya jika nilai guna suatu kebijakan rendah maka akan rendah pula keinginan petani akan adanya kebijakan tersebut. Nilai guna dapat dibedakan menjadi 2 pengertian (Tores, 2011 dalam Supandi, 2012), berikut adalah penjelasannya:

1. Nilai Guna Marginal (Marginal Utility)

Nilai guna marginal adalah pertambahan atau pengurangan tingkat kepuasan konsumen yang disebabkan akibat adanya pertambahan atau pengurangan penggunaan suatu produk tertentu yang menyebabkan tingkat kepuasan konsumen berubah.

2. Nilai Guna Total (Total Utility)

Nilai guna total merupakan keseluruhan tingkat kepuasan konsumen yang diperoleh dari mengkonsumsi sejumlah barang-barang tertentu. Dengan kata lain utilitas total merupakan gabungan antara kelebihan dan kekurangan suatu produk yang didapat konsumen dan kombinasi tersebut dapat melambangkan kepuasan konsumen dalam produk tersebut.

Sementara itu berdasarkan tingkat ekonomi yang dilakukan konsumen, nilai guna dapat dibagi menjadi dua tindakan yang saling berhubungan, berikut adalah penjelasan dua tindakan tersebut (Tores, 2011 dalam Supandi, 2012):

1. Nilai Guna Keputusan

Nilai guna keputusan berhubungan dengan tindakan pembelian yang dilakukan oleh konsumen yang membeli beberapa barang pada waktu yang bersamaan, sebelum melakukan pembelian konsumen harus membuat keputusan barang yang mana yang akan dibeli.

2. Nilai Guna Pengalaman

Nilai guna pengalaman merupakan nilai guna yang berkaitan dengan tindakan mengkonsumsi yang dilakukan oleh konsumen dengan pemenuhan kapasitas kepuasan dari suatu produk.



III. KERANGKA TEORITIS

3.1. Kerangka Pemikiran

Cabai rawit merupakan salah satu komoditas pertanian yang strategis karena banyak dicari oleh sebagian besar masyarakat Indonesia baik sebagai bahan baku produksi maupun sebagai penyedap rasa bagi makanan. Permasalahan yang sering timbul adalah mengenai harga cabai rawit yang sering mengalami fluktuasi yang sangat signifikan pada waktu-waktu tertentu. Fluktuasi harga ini bisa disebabkan oleh cuaca atau pergeseran harga dalam perdagangan internasional (Tolley, 1982) Pada saat harga sedang anjlok banyak dari petani mengalami kerugian, bahkan tanaman yang sudah siap panen hanya dibiarkan saja, karena hasil penjualan cabai rawit yang telah di panen tidak dapat menutupi untuk biaya panennya saja.

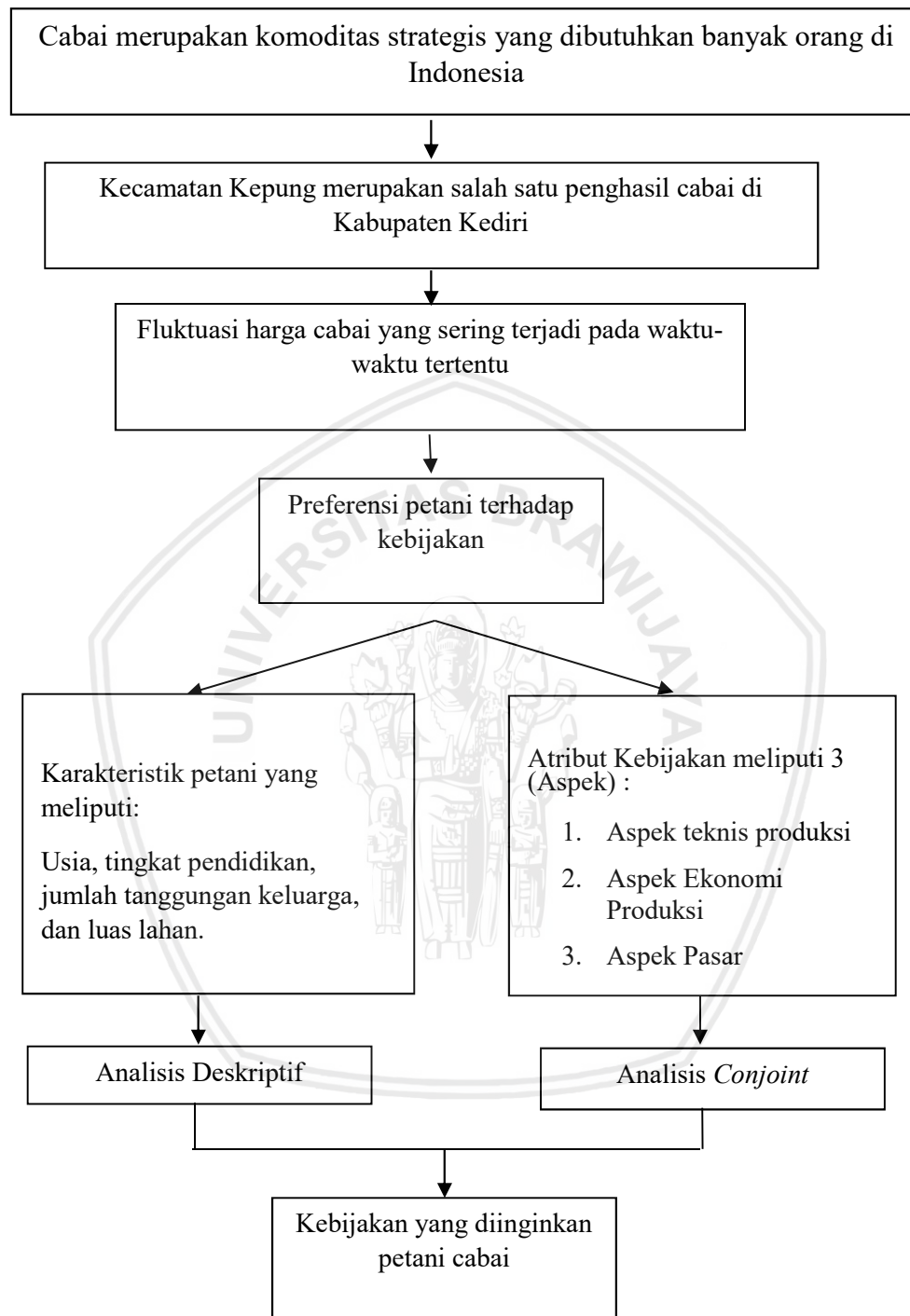
Kecamatan kepung merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kediri, kecamatan ini menjadi salah satu penghasil cabai rawit terbesar di kabupaten Kediri, produksinya hanya kalah dengan kecamatan Puncu dan pagu. mayoritas warganya berprofesi sebagai petani, khususnya adalah petani cabai rawit, lahan di desa ini terbagi menjadi 2 yaitu adalah lahan sawah dan lahan tegalan, untuk sistem irigasinya lahan sawah menggunakan sistem irigasi teknis, karena berada tepat disebelah bendungan yang ada di desa tersebut, sementara untuk lahan tegalan menggunakan sistem irigasi tadah hujan. Petani cabai di desa Siman masih banyak yang menggunakan metode bercocok tanam yang mengikuti para leluhurnya, kebanyakan dari mereka mengaku tidak pernah mendapatkan penyuluhan dari lembaga pemerintahan.

Dalam sektor pertanian campur tangan pemerintah sangat dibutuhkan dalam membantu petani melakukan usahatani, karena secara langsung maupun tidak langsung kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah akan berdampak kepada petani. Disisi lain peran pemerintah tentu sangatlah besar dalam keberlanjutan usaha tani petani cabai. Hal tersebut disebabkan karena para petani kecil tidak memiliki akses pasar yang luas dan petani tidak dapat menjual hasil panennya secara langsung kepada konsumen, sehingga pemerintah harus mengetahui apa yang diinginkan petani melalui preferensi petani. Tetapi kebijakan yang dibuat banyak yang tidak mempertimbangkan kondisi petani di lapang, sehingga dampak yang dirasakan petani tidak terlalu besar, pemerintah lebih banyak memberikan

bantuan berupa alat-alat pasca panen. Intervensi pemerintah semacam itu sering mengakibatkan dampak yang rendah terhadap target kelompok yaitu petani dan keberhasilan yang lebih rendah untuk program pembangunan (Feder et al., dalam Bekele 2006).

Untuk mengetahui apa yang diinginkan dan apa yang dibutuhkan oleh petani, analisis conjoint dapat memberikan solusi untuk mengetahui preferensi dari petani di lapang, analisis ini dilakukan dengan meminta petani yang ada di lapang untuk memberikan penilaian tentang beberapa atribut aspek kebijakan dan taraf kebijakan yang telah ditentukan. Penelitian ini menggunakan analisis conjoint karena analisis conjoint dapat menjadi salah satu metode yang dapat mengukur preferensi petani. Conjoint dipilih karena pada umumnya penelitian yang dilakukan dengan menggunakan analisis conjoint dapat memberikan hasil yang sama dengan apa yang diinginkan oleh responden (Boyke et al., 2001).

Berdasarkan uraian di atas dapat dibuat alur logika berpikir yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan tentang kurang tepatnya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam komoditas cabai. Kerangka pemikiran penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran Perumusan Kebijakan Untuk Komoditas cabai Melalui analisis *conjoint*

3.2. Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dijelaskan di atas maka adapun hipotesis yang diperoleh sementara tentang kebijakan cabai.

H₀ : Diduga tidak ada korelasi yang kuat antara preferensi estimasi dan preferensi aktual responden

H₁ : Diduga ada korelasi yang kuat antara preferensi estimasi dan preferensi aktual responden

3.3. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Untuk menghindari kesalahan penafsiran kata di penelitian ini, maka perlu dijelaskan definisi operasional dan pengukuran variabel pokok kebijakan dalam penelitian, sebagai berikut:

1. Preferensi Petani

Preferensi petani yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Sebagai pilihan suka atau tidak suka terhadap suatu kebijakan pertanian dan kemudian diranking sesuai dengan kesukaan hingga tidak suka.

2. Aspek Teknis Produksi

Aspek teknis produksi merupakan jenis kebijakan pertanian yang berkaitan dengan teknis produksi, dimana pemerintah memberikan bantuan berupa fasilitas umum maupun bantuan-bantuan lainnya yang diharapkan dapat menunjang budaya bahkan meningkatkan produksi serta pendapatan petani. Contohnya adalah kebijakan pembangunan irigasi, perbaikan tek. UT - Demo plot, perbaikan tek. UT – Penyuluhan. Pengukuran variabel aspek teknis produksi diukur menggunakan skala likert di bawah ini:

- a) 5: sangat diinginkan; jika kebijakan yang ada didalamnya yang meliputi kebijakan pembangunan irigasi, perbaikan teknis usaha tani melalui demoplot, dan perbaikan teknis usaha tani – penyuluhan dirasa dapat bermanfaat bagi petani dalam menjalankan kegiatan usaha tani cabainya.
- b) 4: diinginkan; jika terdapat salah satu kebijakan yang ada didalamnya dirasa tidak bermanfaat bagi petani cabai dalam menjalankan kegiatan usaha tani cabainya.

- c) 3: Cukup diinginkan; jika hanya terdapat satu kebijakan saja yang dianggap bermanfaat untuk petani cabai dalam menjalankan kegiatan usaha tani cabainya.
- d) 2: Tidak diinginkan; jika semua kebijakan yang ada dirasa tidak bermanfaat untuk petani cabai dalam menjalankan kegiatan usaha tani cabainya.
- e) 1: Sangat tidak diinginkan; jika semua kebijakan dirasa tidak bermanfaat bahkan bisa merugikan atau menghambat petani cabai dalam kegiatan usaha tani cabainya.

3. Aspek Ekonomi Produksi

Aspek ekonomi produksi merupakan jenis kebijakan pertanian yang berkaitan dengan ekonomi produksi dimana pemerintah memiliki tujuan untuk membantu petani dalam hal biaya produksi baik secara langsung maupun secara tidak langsung dan membantu petani untuk terhindar dari kerugian sehingga terdapat keberlanjutan bagi petani dalam menjalankan usaha taninya. Contohnya seperti kebijakan harga pupuk, kebijakan harga benih, kebijakan harga hasil pertanian. Pengukuran variabel aspek ekonomi produksi diukur menggunakan skala likert di bawah ini:

- a) 5: sangat diinginkan; jika kebijakan yang ada didalamnya yang meliputi kebijakan kebijakan harga pupuk, kebijakan harga benih, kebijakan harga hasil pertanian, dirasa dapat bermanfaat bagi petani dalam menjalankan kegiatan usaha tani cabainya.
- b) 4: diinginkan; jika terdapat salah satu kebijakan yang ada didalamnya dirasa tidak bermanfaat bagi petani cabai dalam menjalankan kegiatan usaha tani cabainya.
- c) 3: Cukup diinginkan; jika hanya terdapat satu kebijakan saja yang dianggap bermanfaat untuk petani cabai dalam menjalankan kegiatan usaha tani cabainya.
- d) 2: Tidak diinginkan; jika semua kebijakan yang ada dirasa tidak bermanfaat untuk petani cabai dalam menjalankan kegiatan usaha tani cabainya.

- e) 1: Sangat tidak diinginkan; jika semua kebijakan dirasa tidak bermanfaat bahkan bisa merugikan atau menghambat petani cabai dalam kegiatan usaha tani cabainya.

4. Aspek Pasar

Aspek pasar merupakan kebijakan pertanian yang berkaitan dengan pasar/penjualan dan pembelian hasil panen, dimana pemerintah membantu petani dalam hal pemasaran hasil panennya baik secara langsung dengan kebijakan pembelian hasil panen maupun dengan kebijakan yang dapat mempermudah petani dalam memasarkan produknya sehingga dapat meningkatkan pendapatan petani dan dapat menjamin petani terhindar dari kerugian, contohnya meliputi kebijakan pembelian hasil pertanian pemerintah, kebijakan penyebaran informasi, pengadaan pasar komoditas. Pengukuran variabel aspek pasar diukur menggunakan skala likert di bawah ini:

- a) 5: sangat diinginkan; jika kebijakan yang ada didalamnya yang meliputi pembelian hasil pertanian pemerintah, kebijakan penyebaran informasi, pengadaan pasar komoditas dirasa dapat bermanfaat bagi petani dalam menjalankan kegiatan usaha tani cabainya.
- b) 4: diinginkan; jika terdapat salah satu kebijakan yang ada didalamnya dirasa tidak bermanfaat bagi petani cabai dalam menjalankan kegiatan usaha tani cabainya.
- c) 3: Cukup diinginkan; jika hanya terdapat satu kebijakan saja yang dianggap bermanfaat untuk petani cabai dalam menjalankan kegiatan usaha tani cabainya.
- d) 2: Tidak diinginkan; jika semua kebijakan yang ada dirasa tidak bermanfaat untuk petani cabai dalam menjalankan kegiatan usaha tani cabainya.
- e) 1: Sangat tidak diinginkan; jika semua kebijakan dirasa tidak bermanfaat bahkan bisa merugikan atau menghambat petani cabai dalam kegiatan usaha tani cabainya.

5. Analisis *Conjoint*

Analisis *conjoint* merupakan teknik analisis guna mengukur preferensi konsumen terhadap variable (spesifikasi atau fitur) sebuah produk atau jasa.

Definisi operasional dan pengukuran variabel pada aspek teknis produksi dijelaskan sebagai berikut:

6. Pembangunan Irigasi

Pembangunan irigasi merupakan jenis bantuan yang diberikan oleh pemerintah dalam bentuk pembangunan saluran irigasi dalam suatu wilayah pertanian baik berupa dana dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah. Pengukuran variabel kebijakan pembangunan irigasi diukur menggunakan skala likert di bawah ini:

- a) 5: sangat diinginkan; jika kebijakan tersebut dirasa sangat bermanfaat bagi petani dan dapat berdampak secara langsung dalam menjalankan kegiatan usaha tani cabainya.
- b) 4: diinginkan; jika kebijakan tersebut dirasa bermanfaat bagi petani cabai tetapi dampak yang ada tidak dirasakan secara langsung oleh petani dalam menjalankan kegiatan usaha tani cabainya, melainkan membutuhkan waktu dan proses yang lama.
- c) 3: Cukup diinginkan; jika kebijakan tersebut memiliki manfaat hanya saja petani belum yakin akan manfaat kebijakan tersebut.
- d) 2: Tidak diinginkan; jika kebijakan tersebut dirasa tidak bermanfaat untuk petani cabai dalam menjalankan kegiatan usaha tani cabainya.
- e) 1: Sangat tidak diinginkan; jika kebijakan tersebut dirasa tidak bermanfaat bahkan bisa merugikan atau menghambat petani cabai dalam kegiatan usaha tani cabainya.

7. Perbaikan Teknis Usaha Tani – Demo Plot

Kebijakan Perbaikan Teknis Usaha Tani – Demo Plot merupakan suatu bantuan kebijakan yang diberikan oleh pemerintah dalam hal memberikan pemahaman baru terhadap petani dalam melakukan kegiatan usaha taninya dengan menggunakan metode demo plot, demo plot adalah suatu metode penyuluhan pertanian kepada petani, dengan cara membuat lahan percontohan agar petani bisa melihat dan membuktikan terhadap objek yang didemonstrasikan. Pengukuran variabel kebijakan perbaikan teknis usaha tani – demo plot diukur menggunakan skala likert di bawah ini:

- a) 5: sangat diinginkan; jika kebijakan tersebut dirasa sangat bermanfaat bagi petani dan dapat berdampak secara langsung dalam menjalankan kegiatan usaha tani cabainya.
- b) 4: diinginkan; jika kebijakan tersebut dirasa bermanfaat bagi petani cabai tetapi dampak yang ada tidak dirasakan secara langsung oleh petani dalam menjalankan kegiatan usaha tani cabainya, melainkan membutuhkan waktu dan proses yang lama.
- c) 3: Cukup diinginkan; jika kebijakan tersebut memiliki manfaat hanya saja petani belum yakin akan manfaat kebijakan tersebut.
- d) 2: Tidak diinginkan; jika kebijakan tersebut dirasa tidak bermanfaat untuk petani cabai dalam menjalankan kegiatan usaha tani cabainya.
- e) 1: Sangat tidak diinginkan; jika kebijakan tersebut dirasa tidak bermanfaat bahkan bisa merugikan atau menghambat petani cabai dalam kegiatan usaha tani cabainya.

8. Perbaiki teknis usaha tani melalui penyuluhan

Kebijakan Perbaikan Teknis Usaha Tani – Penyuluhan merupakan jenis bantuan pemerintah dalam hal memberikan pemahaman baru terhadap petani dalam melakukan kegiatan usaha taninya menggunakan metode penyuluhan dengan mengirimkan tenaga penyuluh ke desa yang perlu diadakan penyuluhan. Pengukuran variabel kebijakan perbaikan teknis usaha tani – penyuluhan diukur menggunakan skala likert di bawah ini:

- a) 5: sangat diinginkan; jika kebijakan tersebut dirasa sangat bermanfaat bagi petani dan dapat berdampak secara langsung dalam menjalankan kegiatan usaha tani cabainya.
- b) 4: diinginkan; jika kebijakan tersebut dirasa bermanfaat bagi petani cabai tetapi dampak yang ada tidak dirasakan secara langsung oleh petani dalam menjalankan kegiatan usaha tani cabainya, melainkan membutuhkan waktu dan proses yang lama.
- c) 3: Cukup diinginkan; jika kebijakan tersebut memiliki manfaat hanya saja petani belum yakin akan manfaat kebijakan tersebut.
- d) 2: Tidak diinginkan; jika kebijakan tersebut dirasa tidak bermanfaat untuk petani cabai dalam menjalankan kegiatan usaha tani cabainya.

- e) 1: Sangat tidak diinginkan; jika kebijakan tersebut dirasa tidak bermanfaat bahkan bisa merugikan atau menghambat petani cabai dalam kegiatan usaha tani cabainya.

Definisi operasional dan pengukuran variabel pada aspek ekonomi produksi dijelaskan sebagai berikut:

9. Kebijakan Harga Pupuk

Kebijakan harga pupuk merupakan jenis kebijakan yang diberikan pemerintah berupa pemberian subsidi terhadap produk pupuk yang dapat meringankan petani dalam hal input produksinya yang diberikan secara langsung maupun melalui pabrik pabrik produsen pupuk. Pengukuran variabel kebijakan harga pupuk diukur menggunakan skala likert di bawah ini:

- a) 5: sangat diinginkan; jika kebijakan tersebut dirasa sangat bermanfaat bagi petani dan dapat berdampak secara langsung dalam menjalankan kegiatan usaha tani cabainya.
- b) 4: diinginkan; jika kebijakan tersebut dirasa bermanfaat bagi petani cabai tetapi dampak yang ada tidak dirasakan secara langsung oleh petani dalam menjalankan kegiatan usaha tani cabainya, melainkan membutuhkan waktu dan proses yang lama.
- c) 3: Cukup diinginkan; jika kebijakan tersebut memiliki manfaat hanya saja petani belum yakin akan manfaat kebijakan tersebut.
- d) 2: Tidak diinginkan; jika kebijakan tersebut dirasa tidak bermanfaat untuk petani cabai dalam menjalankan kegiatan usaha tani cabainya.
- e) 1: Sangat tidak diinginkan; jika kebijakan tersebut dirasa tidak bermanfaat bahkan bisa merugikan atau menghambat petani cabai dalam kegiatan usaha tani cabainya.

10. Kebijakan Harga Benih

Kebijakan harga benih merupakan jenis kebijakan yang diberikan pemerintah berupa pemberian subsidi terhadap harga benih/bibit yang dapat meringankan petani dalam hal input produksinya diberikan secara langsung maupun melalui pabrik pabrik produsen benih/bibit. Pengukuran variabel kebijakan harga pupuk diukur menggunakan skala likert di bawah ini:

- a) 5: sangat diinginkan; jika kebijakan tersebut dirasa sangat bermanfaat bagi petani dan dapat berdampak secara langsung dalam menjalankan kegiatan usaha tani cabainya.
- b) 4: diinginkan; jika kebijakan tersebut dirasa bermanfaat bagi petani cabai tetapi dampak yang ada tidak dirasakan secara langsung oleh petani dalam menjalankan kegiatan usaha tani cabainya, melainkan membutuhkan waktu dan proses yang lama.
- c) 3: Cukup diinginkan; jika kebijakan tersebut memiliki manfaat hanya saja petani belum yakin akan manfaat kebijakan tersebut.
- d) 2: Tidak diinginkan; jika kebijakan tersebut dirasa tidak bermanfaat untuk petani cabai dalam menjalankan kegiatan usaha tani cabainya.
- e) 1: Sangat tidak diinginkan; jika kebijakan tersebut dirasa tidak bermanfaat bahkan bisa merugikan atau menghambat petani cabai dalam kegiatan usaha tani cabainya.

11. Kebijakan Harga Hasil Pertanian

Kebijakan Harga Hasil Pertanian merupakan bantuan pemerintah berupa pemberian harga dasar atau harga atap pada suatu komoditas pertanian. Pengukuran variabel kebijakan harga hasil pertanian adalah sebagai berikut:

- a) 5: sangat diinginkan; jika kebijakan tersebut dirasa sangat bermanfaat bagi petani dan dapat berdampak secara langsung dalam menjalankan kegiatan usaha tani cabainya.
- b) 4: diinginkan; jika kebijakan tersebut dirasa bermanfaat bagi petani cabai tetapi dampak yang ada tidak dirasakan secara langsung oleh petani dalam menjalankan kegiatan usaha tani cabainya, melainkan membutuhkan waktu dan proses yang lama.
- c) 3: Cukup diinginkan; jika kebijakan tersebut memiliki manfaat hanya saja petani belum yakin akan manfaat kebijakan tersebut.
- d) 2: Tidak diinginkan; jika kebijakan tersebut dirasa tidak bermanfaat untuk petani cabai dalam menjalankan kegiatan usaha tani cabainya.
- e) 1: Sangat tidak diinginkan; jika kebijakan tersebut dirasa tidak bermanfaat bahkan bisa merugikan atau menghambat petani cabai dalam kegiatan usaha tani cabainya.

Definisi operasional dan pengukuran variabel pada aspek ekonomi produksi dijelaskan sebagai berikut:

12. Kebijakan Pembelian Hasil Pertanian

Kebijakan pembelian hasil pertanian merupakan jenis kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dengan cara pemerintah membeli hasil panen petani dengan harga yang telah ditetapkan, sehingga menjamin petani untuk terhindar dari kerugian. Pengukuran variabel kebijakan pembelian hasil pertanian adalah sebagai berikut:

- a) 5: sangat diinginkan; jika kebijakan tersebut dirasa sangat bermanfaat bagi petani dan dapat berdampak secara langsung dalam menjalankan kegiatan usaha tani cabainya.
- b) 4: diinginkan; jika kebijakan tersebut dirasa bermanfaat bagi petani cabai tetapi dampak yang ada tidak dirasakan secara langsung oleh petani dalam menjalankan kegiatan usaha tani cabainya, melainkan membutuhkan waktu dan proses yang lama.
- c) 3: Cukup diinginkan; jika kebijakan tersebut memiliki manfaat hanya saja petani belum yakin akan manfaat kebijakan tersebut.
- d) 2: Tidak diinginkan; jika kebijakan tersebut dirasa tidak bermanfaat untuk petani cabai dalam menjalankan kegiatan usaha tani cabainya.
- e) 1: Sangat tidak diinginkan; jika kebijakan tersebut dirasa tidak bermanfaat bahkan bisa merugikan atau menghambat petani cabai dalam kegiatan usaha tani cabainya.

13. Kebijakan Pengadaan Pasar Komoditas

Kebijakan Pengadaan Pasar Komoditas merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan membuat pasar yang khusus untuk menjual satu komoditas tertentu. Pengukuran variabel kebijakan pengadaan pasar komoditas adalah sebagai berikut:

- a) 5: sangat diinginkan; jika kebijakan tersebut dirasa sangat bermanfaat bagi petani dan dapat berdampak secara langsung dalam menjalankan kegiatan usaha tani cabainya.
- b) 4: diinginkan; jika kebijakan tersebut dirasa bermanfaat bagi petani cabai tetapi dampak yang ada tidak dirasakan secara langsung oleh

petani dalam menjalankan kegiatan usaha tani cabainya, melainkan membutuhkan waktu dan proses yang lama.

- c) 3: Cukup diinginkan; jika kebijakan tersebut memiliki manfaat hanya saja petani belum yakin akan manfaat kebijakan tersebut.
- d) 2: Tidak diinginkan; jika kebijakan tersebut dirasa tidak bermanfaat untuk petani cabai dalam menjalankan kegiatan usaha tani cabainya.
- e) 1: Sangat tidak diinginkan; jika kebijakan tersebut dirasa tidak bermanfaat bahkan bisa merugikan atau menghambat petani cabai dalam kegiatan usaha tani cabainya.

14. Kebijakan Penyebaran Informasi

Kebijakan penyebaran informasi merupakan langkah pemerintah untuk memberikan informasi kepada petani apapun itu bentuk informasinya, termasuk didalamnya informasi pasar, dimana akan terkait dengan keberadaan permintaan dan penawaran dari suatu produk. Pengukuran variabel kebijakan penyebaran informasi adalah sebagai berikut:

- a) 5: sangat diinginkan; jika kebijakan tersebut dirasa sangat bermanfaat bagi petani dan dapat berdampak secara langsung dalam menjalankan kegiatan usaha tani cabainya.
- b) 4: diinginkan; jika kebijakan tersebut dirasa bermanfaat bagi petani cabai tetapi dampak yang ada tidak dirasakan secara langsung oleh petani dalam menjalankan kegiatan usaha tani cabainya, melainkan membutuhkan waktu dan proses yang lama.
- c) 3: Cukup diinginkan; jika kebijakan tersebut memiliki manfaat hanya saja petani belum yakin akan manfaat kebijakan tersebut.
- d) 2: Tidak diinginkan; jika kebijakan tersebut dirasa tidak bermanfaat untuk petani cabai dalam menjalankan kegiatan usaha tani cabainya.
- e) 1: Sangat tidak diinginkan; jika kebijakan tersebut dirasa tidak bermanfaat bahkan bisa merugikan atau menghambat petani cabai dalam kegiatan usaha tani cabainya.

IV. METODE PENELITIAN

4.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Hal ini didasari karena data penelitian berupa angka-angka dan dianalisis menggunakan analisis statistik. Menurut Sugiyono (2013) pendekatan kuantitatif adalah pendekatan penelitian yang berlandaskan *positivisme*, pengumpulan datanya menggunakan instrumen penelitian, analisis data menggunakan metode kuantitatif untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan metode deskriptif digunakan untuk menjelaskan mengenai kondisi lingkungan dan karakteristik responden yang diteliti, serta untuk menjelaskan hasil dari analisis data kuantitatif. Menurut Sujarweni (2014) analisis data deskriptif adalah metode analisis yang digunakan untuk menjelaskan secara rinci objek penelitian dari data sampel yang didapatkan dan berhubungan langsung dengan variabel.

4.2. Metode Penentuan Lokasi dan Waktu

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Penentuan lokasi mempertimbangkan bahwa Kecamatan Kepung merupakan salah satu penghasil cabai merah di Kabupaten Kediri. pada tahun 2014 kecamatan Kepung memproduksi 10948 kwintal cabai rawit, kemudian meningkat pada tahun 2015 sebesar 40530 kwintal, dan pada tahun 2016 kembali meningkat menjadi 42047 kwintal (Dinas Pertanian Kabupaten Kediri). Desa Siman dipilih dikarenakan sebagian besar warganya berprofesi sebagai petani cabai, sehingga dianggap dapat mewakili populasi petani cabai rawit di Kecamatan Kepung. Penelitian dilaksanakan selama 3 bulan.

4.3. Teknik Penentuan Sample

Populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 390 petani cabai rawit di desa Siman, kecamatan Kepung. Menurut Sugiyono (2008) sampel adalah bagian dari populasi yang akan diteliti dan dianggap penting yang dapat menggambarkan populasi dalam penelitian. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *probability sampling* dimana pendekatan yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dari petani cabai adalah *simple random sampling*. Yaitu membuat semua petani cabai di Desa Siman, Kecamatan Kepung,

Kabupaten Kediri memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi responden dari penelitian ini. Berikut adalah model dari *simple random sampling* (Parel *et al*, 1973)

$$n = \frac{N Z^2 \sigma^2}{N d^2 + Z^2 \sigma^2}$$

Dimana:

n = ukuran sampel minimum

N = jumlah populasi

Z = nilai ditingkat kepercayaan tertentu, yaitu 95% (dengan nilai sebesar 1,96)

σ^2 = nilai varians dari populasi

d = kesalahan maksimum yang ditoleransi (5%)

Langkah pertama yang harus dilakukan dalam menghitung jumlah sampel penelitian, dilakukan dengan mengukur varians populasi (σ^2). Namun, varians populasi tidak diketahui sehingga digunakan varians sampel (S^2) sebagai gantinya, dengan rumus sebagai berikut:

$$n = \frac{N Z^2 S^2}{N d^2 + Z^2 S^2}$$

Keterangan:

(S^2) = Nilai varians sample

Pada penelitian ini perhitungan varians sample menggunakan sampel kecil (n) dengan jumlah 30 petani berdasarkan keragaman luas lahannya dan memiliki syarat-syarat sebagai berikut:

1. Petani merupakan pemilik lahan, bukan buruh tani
2. Mereka adalah petani cabai yang ikut dalam kelompok tani
3. Petani membeli benih di toko pertanian yang ditentukan oleh dinas Pertanian
4. Sampel tersebut memiliki lahan di area persawahan.

. Rumus perhitungan varians ditunjukkan pada rumus berikut:

$$S^2 = \frac{n \sum X^2 - (\sum X)^2}{n(n-1)}$$

Keterangan:

n = sampel kecil

X = Luas lahan

Berdasarkan rumus tersebut dilakukan perhitungan sample untuk mengetahui sampel minimal yang harus diambil dari total populasi dan diperoleh jumlah sampel yang digunakan agar dapat mewakili keseluruhan populasi adalah 47 orang. Hasil perhitungan sampel menggunakan rumus Parel dapat dilihat pada lampiran 2.

4.4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Berikut adalah teknik pengumpulan data berdasarkan jenisnya:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan langsung dari responden di lapang yang berkaitan dengan hal-hal yang akan diteliti, seperti data luas lahan, data anggota keluarga, data tingkatan kebijakan yang diinginkan, dll. Ada beberapa teknik pengumpulan data primer ini, diantaranya sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan bertanya langsung kepada sampel penelitian dengan menggunakan alat bantu berupa kuisioner. Teknik wawancara ini merupakan usaha/metode pengumpulan data/informasi dengan menggunakan pertanyaan yang diajukan secara lisan dan dijawab secara lisan pula (Sumarsono, 2004). Wawancara dilakukan dengan mengunjungi rumah-rumah petani pada saat malam hari, dikarenakan pada pagi hingga sore hari petani biasanya sedang ada di lahan.

b. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan kegiatan pengamatan kondisi di lokasi penelitian. Pengamatan ini dilakukan secara langsung dengan pergi ke lahan petani-petani di desa Siman. Hal ini akan mempermudah melihat perubahan ataupun pengaruh yang terjadi secara langsung.

2. Data Sekunder

Teknik pengumpulan data sekunder yaitu dengan melakukan dokumentasi berbentuk foto, Kegiatan ini dilakukan untuk menunjang dan memperkuat data yang telah didapatkan. Kemudian selain dokumentasi, data sekunder berupa data letak geografis dan batas administrasi, penggunaan lahan, distribusi

penduduk yang didapat dari Dinas pertanian kabupaten Kediri dan data monografi desa yang didapat dari kantor desa Siman.

4.5. Metode Analisis Data

Menurut Bogdan (dalam Sugiyono, 2008) analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapang, dan bahan-bahan lain sehingga dapat dengan mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif yaitu menggunakan analisis *conjoint*. Analisis *conjoint* dipilih karena mengetahui preferensi keseluruhan responden untuk suatu objek yang dibuat oleh peneliti melalui menentukan nilai pada level dari masing-masing atribut (Hair *et al*, 1998).

Metode *conjoint* memiliki lima prosedur yang perlu dilakukan, secara rinci prosedur ini adalah (Gudono, 2010; Hair *et al*, 1998):

2. Merumuskan masalah

Peneliti harus mengenali atribut dengan level atribut (karakteristik) yang digunakan untuk stimulus (kombinasi atribut). Atribut yang dipilih harus sangat penting dalam mempengaruhi preferensi dan pilihan konsumen.

Berikut adalah atribut beserta level yang akan digunakan dalam penelitian ini:

Tabel 1. Atribut dan level yang digunakan dalam penelitian

Atribut	Level
Aspek teknis produksi	1. Kebijakan pembangunan irigasi 2. Perbaikan tek. UT - Demo plot 3. Perbaikan tek. UT - Penyuluhan
Aspek Ekonomi Produksi	1. Kebijakan harga pupuk 2. Kebijakan harga benih 3. Kebijakan harga hasil panen
Aspek Pasar	1. Kebijakan pembelian hasil pertanian pemerintah 2. Kebijakan penyebaran informasi 3. Pengadaan pasar komoditas

3. Membentuk stimuli

Atribut dan level yang telah terbentuk kemudian digunakan sebagai input untuk menyusun stimulus (kombinasi). Terdapat tiga cara pembentukan stimulus dalam metode *conjoint* yaitu pendekatan pasangan, prosedur profil penuh, dan *orthogonal array* (Gudono, 2010). Pendekatan pasangan, responden diminta untuk mengevaluasi pasangan-pasangan atribut secara bersamaan sampai semua kemungkinan pasangan dua atribut selesai dievaluasi. Prosedur profil penuh seluruh kombinasi dapat digunakan, namun jumlah kombinasi yang dihasilkan semakin banyak dan menyulitkan konsumen dalam melakukan evaluasi. Cara mengatasi hal ini, dapat dilakukan dengan pengurangan jumlah kombinasi pada atribut (stimuli) dengan membentuk desain orthogonal sehingga jumlah stimuli yang terbentuk akan jauh berkurang. *Software* komputer yang dapat membantu adalah SPSS.

Dalam penelitian ini digunakan prosedur profil penuh, yaitu dengan menampilkan semua hasil kombinasi level yang didapatkan. Perhitungan stimuli dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$S = k \times k \times k \times \dots \times k$$

Keterangan:

S = Jumlah stimuli

K = banyaknya level pada atribut

Berdasarkan Tabel 1 dan rumus di atas dapat dilakukan perhitungan sebagai berikut:

$$3 \times 3 \times 3 = 27$$

Sehingga dapat disimpulkan jumlah stimuli yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebesar 27 stimuli, yang nantinya akan dianalisis menggunakan analisis *conjoint*.

4. Menentukan bentuk input data dan Proses *conjoint*

Data yang dibutuhkan berupa nonmetrik (kualitatif) maupun metrik (kuantitatif). Data berjenis kualitatif didapatkan melalui pembuatan *ranking* atau mengurutkan stimuli yang telah dibuat pada tahap sebelumnya oleh responden. Pengurutan dimulai dari stimuli yang disukai sampai pada stimuli yang tidak disukai. Data berjenis kuantitatif didapatkan dengan membuat *rating* atau nilai

terhadap masing-masing stimuli oleh responden. Data berjenis kuantitatif ini lebih disukai responden, karena tidak membutuhkan pertimbangan yang tidak terlalu rumit dan analisisnya jauh lebih mudah.

Stimuli yang telah terbentuk kemudian dilanjutkan dengan proses *conjoint* yang menggunakan program SPSS dan pastikan data pada SPSS dalam keadaan kosong.

5. Memilih metode analisis

Model dasar *conjoint* analysis dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$U(x) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^{k_i} \alpha_{ij} x_{ij}$$

Keterangan:

$U(x)$ = Total Nilai Kegunaan

α_{ij} = Nilai kegunaan atribut ke i level ke j

k_i = Banyaknya level atribut ke i

n = banyaknya atribut

i = 1, 2, ..., m (atribut ke i)

j = 1, 2, ..., k_i (level ke- j)

X_{ij} = nilai peubah boneka (bernilai 1 jika ada, 0 jika tidak ada)

6. Menginterpretasikan hasil

Penginterpretasikan hasil analisis perlu diplotkan fungsi *utility* sehingga dapat dilihat dalam bentuk table dan grafik (yang dihasilkan dalam perhitungan) sehingga dapat diketahui manakah produk rencana yang dipilih konsumen. Interpretasi diperoleh dari hasil perhitungan analisis *conjoint* seperti berikut:

- Variabel yang disukai atau yang dianggap penting oleh responden atau konsumen.
- Level yang paling disukai atau dianggap penting dari variabel yang paling dianggap penting oleh responden atau konsumen.
- Nilai kepentingan relative tiap variabel.

Semakin besar nilai perbedaan kegunaan, semakin tinggi tingkat kepentingan variabel tersebut. Pemberian dasar pembandingan yang konsisten antara responden, perbedaan nilai di standarisasikan dengan membagi tiap perbedaan nilai dengan

jumlah dari seluruh perbedaan nilai. Hasilnya adalah tingkat kepentingan untuk tiap variabel yang berjumlah 100% tiap individu pada seluruh variabel. Jika ada suatu tingkat kepentingan yang mempunyai nilai perbedaan ekstrim atau tidak mungkin ada dalam keadaan sebenarnya, sebaiknya variabel tersebut dihilangkan dari analisis atau tingkat kepentingan tingkat tersebut dikurangkan untuk memproyeksikan perbedaan tingkat fisibel.



V. PEMBAHASAN

5.1. Gambaran umum

5.1.1. Letak Geografis dan Batas Administrasi

Desa Siman merupakan salah satu desa dari 10 desa yang berada di Kecamatan Kepung, kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. Desa Siman berada pada ketinggian 331 mdpl dan koordinat $111^{\circ}15'$ – $112^{\circ}03'$ BT dan $7^{\circ}45'$ – $7^{\circ}55'$ LS. Jarak dari Desa Siman ke pusat Kota Kediri sekitar 30 km, sementara jarak dari Desa Siman ke Gunung kelud berjarak 15 km. Penggunaan lahan di Desa Siman terdiri dari sawah, pekarangan, ladang dan hutan serta pemukiman/atau bangunan, dengan tipologi persawahan seluas 517,60 Ha. Berikut merupakan tabel batas wilayah Desa Siman:

Tabel 2. Batas Wilayah Desa Siman, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri Tahun 2017.

Batas	Batas Desa	Batas Kecamatan
Sebelah Utara	Desa Brumbung	Kecamatan Kandangan
Sebelah Selatan	Desa Besowo dan Desa Kampung Baru	Kecamatan Puncu
Sebelah Barat	Desa Kepung	Kecamatan Puncu
Sebelah Timur	Sungai Konto dan Desa Pondok Agung (Kabupaten Malang)	Kecamatan Kasembon (Kabupaten Malang)

Sumber: *Profil Desa Siman Kecamatan Kepung, 2017*

Batas administrasi Desa Siman yaitu sebelah Utara berbatas dengan Desa Brumbung Kecamatan Kandangan, sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Besowo dan Desa Kampung Baru Kecamatan Puncu, sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kepung Kecamatan Puncu, dan sebelah Timur berbatas dengan Sungai Konto Desa Pondok Agung Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang. Desa Siman memiliki 6 dusun diantaranya Dusun Juwah, Dusun Bogorpradah, Dusun Siman, Dusun Puncing, Dusun Sukabumi, dan Dusun Karetan.

Untuk kondisi geografis di Desa Siman, suhu rata-rata musim kemarau berkisar antara $27.18 - 29.02^{\circ}\text{C}$. Suhu maksimum berkisar antara $35.20 - 35.96^{\circ}\text{C}$. Suhu minimum berkisar antara $19.66 - 22.10^{\circ}\text{C}$. Untuk kelembaban udara rata-rata berkisar antara 81.96% sampai 90.66%. rata-rata kecepatan angin berkisar antara

59.00 km bulan⁻¹ sampai 91.40 km bulan⁻¹, Rata-rata lama penyinaran matahari bulanan tahun 2009-2013 berkisar antara 4.9 jam/hari sampai 10.6 jam/hari. Sementara untuk curah curah hujan efektif (Re) bulan Maret (133.5 mm), April (102.0 mm), Mei (124.0 mm), Juni (52.0 mm), Juli (36.7 mm), Agustus (11.2 mm), dan September (55.8 mm) (Kinasih *et al*, 2015). Sementara itu jenis tanah di Desa Siman, Kecamatan Kepung merupakan Regosol coklat kekelabuan (Masykuri, 2013)

5.1.2. Penggunaan Lahan di Desa Siman

Desa Siman dikelilingi oleh lahan persawah dan tegalan, untuk lahan persawahan menggunakan irigasi teknis, sementara untuk lahan tegalan menggunakan sistem irigasi tadah hujan. Berikut merupakan luas wilayah Desa Siman berdasarkan penggunaannya.

Tabel. 3 Luas Wilayah Desa Siman, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri Menurut Penggunaannya.

Keterangan Penggunaan	Luas (Ha)
Luas pemukiman	86,4
Luas persawahan	130
Luas kuburan	0,5
Luas wilayah	216,9 ha/m2

Sumber: *Profil Desa Siman Kecamatan Kepung, 2017*

Berdasarkan data di atas terdapat 3 jenis penggunaan lahan, penggunaan lahan tertinggi adalah digunakan untuk persawahan seluas 130 ha/m2, kemudian 86,4 ha/m2 digunakan untuk pemukiman, dan sisanya sebesar 0,5 ha/m2 diperuntukkan untuk kuburan. Penggunaan lahan yang ada di Desa Siman kebanyakan masih dimanfaatkan dalam sektor pertanian terutama pertanian pada tanaman semusim. Penggunaan luasan lahan adalah faktor penting dalam mendorong kegiatan pertanian. Ladang menjadi media tumbuh terluas bagi tanaman pertanian di Desa Siman.

5.1.3. Distribusi Penduduk

Distribusi penduduk Desa Siman Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri dapat dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin, pendidikan, dan mata pencaharian penduduk.

1. Distribusi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Penduduk Desa Siman berdasarkan profil desa pada tahun 2016 berjumlah 6.458 dengan jumlah kepala keluarga (KK) sebanyak 1.682 KK dan 1893 rumah berpenghuni. Desa Siman memiliki kepadatan penduduk 1.247 jiwa/. Rincian data distribusi penduduk Desa Siman berdasarkan jenis kelamin ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 4. Distribusi Penduduk Desa Siman, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri Berdasarkan Jenis Kelamin.

Jenis Kelamin	Jumlah Jiwa	Presentase(%)
Pria	3.160	48,93
Perempuan	3.298	51,07
Total	6.458	100

Sumber: Dirjen Binapemdes Kemendagri, 2017 (diolah)

Dari Tabel 4, diketahui penduduk Desa Siman dengan jenis kelamin laki- laki sebanyak 3.160 orang atau 48,93 persen. Sedangkan penduduk dengan jenis kelamin perempuan lebih banyak daripada laki-laki yaitu sebanyak 3.298 orang atau sebesar 51,07 persen.

2. Distribusi Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Penduduk di Desa Siman memiliki keberagaman tingkat pendidikan. Data distribusi penduduk Desa Siman berdasarkan tingkat pendidikan ditunjukkan pada Tabel 5 berikut:

Tabel 5. Distribusi Penduduk Desa Siman, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	Tingkat pendidikan	Jumlah	Presentase
1.	Tidak pernah sekolah	148	2,90 %
2.	Tidak tamat SD/ sederajat	48	0,94 %
3.	Tamat SD/ sederajat	1.986	38,95 %
4.	Tidak tamat SMP/ sederajat	43	0,85 %
5.	Tamat SMP/ Sederajat	1.483	29,08 %
6.	Tamat SMA	1.320	25,89 %
7.	Tamat D-1/ Sederajat	28	0,54 %
8.	Tamat D-2/ Sederajat	23	0,45 %
9.	Tamat S-2/ Sederajat	19	0,37 %

Sumber: *Profil Desa Siman Kecamatan Kepung, 2017*

Distribusi penduduk di Desa Siman berdasarkan tingkat pendidikannya di dominasi oleh penduduk dengan tingkat pendidikan SD yaitu sebanyak 38,95%, kemudian diikuti oleh penduduk dengan tingkat pendidikan SMP yaitu sebanyak 29,08%. Sedangkan tingkat pendidikan lainnya yaitu 2,90% penduduk yang tidak pernah sekolah, 0,94% penduduk tidak tamat SD, 0,85% penduduk tidak tamat SMP, 25,89% penduduk tamat SMA, 0,54% penduduk tamat S-1/ sederajat, 0,45% penduduk tamat D-2/ Sederajat, dan 0,37% penduduk tamat S-2/ Sederajat.

3. Distribusi Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian di Desa Siman

Penduduk di Desa Siman memiliki mata pencarian yang berbeda – beda. Secara administratif terdapat 13 jenis mata pencarian yang digeluti warga di Desa Siman meliputi petani, buruh tani, buruh migran, PNS, pengerajin industri rumah tangga, pedagang keliling, peternak, montir, bidan swasta, perawat swasta, pembantu rumah tangga, TNI & Pensiunan, dan pengusaha kecil menengah. Presentase jumlah tiap mata pencarian dapat dilihat pada Tabel 6. Mata Pencarian di Desa Siman.

Tabel 6. Mata Pencanharian di Desa Siman, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri

Jenis Mata Pencanharian	Jumlah	Presentase(%)
Petani	623	29,15
Buruh tani	1.268	60,17
Buruh migran	20	0,93
Pegawai Negeri Sipil	26	1,21
Pengrajin industri rumah tangga	14	0,65
Pedagang keliling	1	0,04
Peternak	23	1,07
Montir	10	0,46
Bidan swasta	2	0,09
Perawat swasta	10	0,46
Pembantu Rumah Tangga	6	0,28
TNI dan pensiunan	12	0,56
Pengusaha kecil menengah	104	4,86
Total	2137	100

Sumber: *Profil Desa Siman, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, 2017*

Sebagian besar penduduk Desa Siman berprofesi sebagai buruh tani dan petani yaitu sebesar 60,17% dan 29,15%. Kemudian profesi lainnya yaitu 0,93% sebagai buruh migran, 1,21% sebagai pegawai negeri sipil, 0,65% sebagai pengerajin industri rumah tangga, 1,07% sebagai peternak. 0,28% sebagai pembantu rumah tangga, 0,56% TNI dan pensiunan, dan 4,86% penduduk bekerja sebagai pengusaha kecil menengah. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa mayoritas penduduk masih bergantung pada sektor pertanian.

5.2. Karakteristik Responden

Karakteristik responden didapatkan dari kegiatan wawancara secara langsung dengan responden. Responden yang dimaksudkan adalah petani cabai rawit yang ada di Desa Siman. Jumlah responden adalah sebanyak 35 petani dari populasi 390 orang telah dapat mewakili untuk menjadi responden dalam penelitian ini. Karakteristik responden dalam penelitian ini meliputi usia petani, tingkat pendidikan, jumlah anggota keluarga, dan luas lahan. Uraian tiap karakteristik responden dapat disimak dalam penjelasan sebagai berikut.

1. Usia

Karakteristik responden dapat dilihat dari berapa usia yang dimiliki responden. Usia dapat menjadi faktor keberhasilan dalam mengusahakan bidang

pertanian. Menurut Rukka & Wahab (2013) bahwasanya usia petani yang terlalu tua dan tidak produktif dapat mengurangi dalam segi kemampuan fisik ketika mengusahakan pertanian. Karakteristik usia responden dapat dilihat pada Tabel 7. Badan Pusat Statistik (BPS, 2015) melakukan pengelompokan usia produktif usia 15 tahun ke atas atau lebih tua dari batas usia kerja pada periode sebelumnya (1) Kelompok penduduk umur 0-14 tahun dianggap sebagai kelompok yang belum produktif secara ekonomis. (2) usia 15-64 tahun sebagai kelompok produktif. (3) Kelompok penduduk umur 64 tahun ke atas sebagai kelompok yang tidak lagi produktif. Berikut merupakan pengelompokan usia petani cabai rawit:

Tabel 7. Usia Petani Cabai Yang Dijadikan Responden

No.	Usia	Jumlah (orang)	Presentase (%)
1.	<14 tahun	0	0
2.	15-64 tahun	32	91%
3	>64 tahun	3	9%

Sumber: Analisis Data Primer, 2018

Berdasarkan Tabel 7 di atas rata-rata petani yang menjadi responden ada pada kisaran usia 15-64 tahun dengan presentase 91%, petani di bawah 14 tahun 0%, dan petani dengan usia di atas 64 tahun 9%. Karakteristik usia petani yang dijadikan responden penelitian adalah kebanyakan usia produktif, pada usia tersebut petani dapat dikatakan lebih memiliki kemampuan fisik yang lebih baik dari usia tidak produktif serta mudahnya beradaptasi terhadap kondisi dan teknologi untuk pertanian terutama pada usahatani jagung ataupun cabai.

2. Tingkat Pendidikan

Pengetahuan petani mengenai pertanian dapat diperoleh dari media pendidikan formal maupun non formal. Pendidikan formal petani dapat ditempuh melalui sekolah dasar dan sekolah menengah bahkan perguruan tinggi. Pendidikan non formal dapat diperoleh dari sosialisasi ilmu pertanian maupun penyuluhan, kursus dan pelatihan (Hutauruk, 2009). Karakteristik responden penelitian dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8. Tingkat Pendidikan Petani Cabai Yang Dijadikan Responden Penelitian

Tingkat Pendidikan	Jumlah	Presentase(%)
Tidak Sekolah	1	2
SD Tidak Tamat	2	5
SD Tamat	20	48
SMP	6	14
SLTA	11	26
D3	0	0
S1/di atasnya	2	5
Total	42	100

Sumber: Analisis Data Primer, 2018

Tingkat pendidikan responden penelitian di Desa Siman menunjukkan bahwasanya rata-rata responden memiliki tingkat pendidikan yakni tamat SD. Responden yang memiliki tingkat pendidikan SD sebesar 49% dari jumlah keseluruhan jenis tingkat pendidikan responden, kemudian terbesar kedua adalah SLTA dengan presentase 31 %, SMP 11%, tidak sekolah 3%, tidak tamat SD 3%, S1 atau di atasnya 3%, dan D3 0%.

3. Jumlah Tanggungan Keluarga

Tabel 12 menunjukkan jumlah tanggungan keluarga petani responden. Petani dengan tanggungan keluarga 5-6 orang sejumlah 4 orang atau 11%, petani dengan jumlah tanggungan keluarga 3-4 orang sebanyak 16 orang atau 46%, petani dengan jumlah tanggungan keluarga 1-2 orang sebanyak 15 orang atau 43%.

Tabel 9. Jumlah Tanggungan Keluarga Petani Cabai Yang Dijadikan Responden

Rentang Jumlah Tanggungan(orang)	Jumlah	Presentase(%)
5-6	6	11
3-4	19	46
1-2	17	43
Total	42	100

Sumber: Analisis Data Primer, 2018

4. Luas lahan

Luas lahan adalah salah satu faktor yang penting dalam melakukan kegiatan usahatani. Karakteristik luas lahan adalah pemanfaatan luas lahan yang digunakan petani responden untuk usahatani jagung cabai rawit. Luas lahan petani responden di Desa Siman disajikan dalam Tabel 10 berikut:

Tabel 10. Luas Lahan Petani Responden

Rentang Luas lahan	Jumlah	Presentase(%)
> 0,8	7	17
0,5 – 0,8	6	14
0,25 - 0,5	11	26
< 0,25	18	43
Total	42	100

Sumber: Analisis Data Primer, 2018

Berdasarkan Tabel 10. Distribusi Luas Lahan Responden menunjukkan responden yang memiliki luasan lahan di atas 0,8 ha sebanyak 17% atau sebanyak 6 orang. Responden yang memiliki luasan lahan kisaran 0,25 – 0,8 sebanyak 40% atau sebanyak 14 orang. Responden yang memiliki luasan lahan kurang dari 0,25 ha sebanyak 43% atau 15 orang. Sehingga dapat disimpulkan responden dalam penelitian ini kebanyakan memiliki luasan lahan di bawah 0,25 ha.

5.3. Analisis Preferensi Petani Terhadap Aspek Kebijakan Pemerintah

Penelitian ini menggunakan 3 aspek kebijakan pemerintah, diantaranya adalah aspek teknis produksi, aspek ekonomi produksi, dan aspek pasar yang kemudian diolah menggunakan analisis *conjoint*. Berdasarkan hasil oleh data, didapatkan hasil seperti Gambar 2. Tingkat kepentingan tertinggi adalah teknis produksi dengan presentase 37.158%, kemudian tertinggi kedua adalah aspek pasar dengan presentase 33.012%, dan terendah adalah aspek ekonomi produksi dengan presentase 29.83%.

Rata-rata Nilai Kepentingan Tiap Aspek Kebijakan (%)



Gambar 2. Rata-rata Nilai Kepentingan Aspek Kebijakan (%)

5.3.1. Aspek Teknis Produksi

Berdasarkan hasil analisis yang diperoleh, aspek teknis produksi menempati urutan pertama, artinya petani lebih mementingkan aspek teknis produksi yang mana didalamnya terdapat 3 taraf yaitu pembangunan irigasi, perbaikan teknis usaha tani melalui demoplot, dan perbaikan teknis usaha tani melalui penyuluhan. Petani lebih mementingkan kebijakan perbaikan teknis usaha tani melalui penyuluhan dibanding kebijakan aspek teknis produksi lain yang bisa dilihat di Lampiran 8. Penyuluhan memiliki kontribusi penting untuk meningkatkan pembangunan pertanian dan peningkatan produksi pangan telah menyebabkan cepatnya perkembangan minat orang dalam penyuluhan selama beberapa dekade terakhir (Ban dan Hawkins, 1999) Kebijakan penyuluhan sendiri menjadi keinginan petani dikarenakan petani ingin lebih baik lagi untuk kedepannya, baik dalam hal ekonomi maupun dalam hal keberlanjutan lingkungannya. Soedijanto (dalam Sadono, 2008) menyatakan bahwa mutu SDM petani akan dapat mendukung pembangunan pertanian kini dan masa mendatang jika penyuluhan pertanian merupakan proses pemberdayaan, bukan proses transfer teknologi.

Minimnya informasi tentang cara bercocok tanam yang berkelanjutan dari penyuluh membuat sebagian besar petani melakukan sistem usaha tani yang berorientasi pada obat-obatan kimia telah membuat dampak buruk bagi lingkungan, petani mengaku semakin lama kebutuhan akan pupuk kian meningkat. Hal ini dikarenakan banyak petani yang belum pernah mendapatkan penyuluhan dari pemerintah langsung, penyuluhan yang berlangsung biasanya berasal dari produsen pupuk maupun pestisida yang menurut petani lebih seperti promosi produk daripada penyuluhan cara bercocok tanam, sementara penyuluhan dari pemerintah sendiri belum pernah dirasakan oleh petani, sehingga pemerintah harus menggalakkan lagi penyuluhan pertanian di daerah-daerah. Selain hal itu, keadaan di lapang masih banyak petani yang tidak masuk dalam kelompok tani, sehingga membuat akses informasi mengenai cara bercocok tanam menjadi semakin sulit.

Permasalahan tersebut berbuntut pada ketergantungan petani terhadap pupuk kimia dan pestisida kimia. Selain berdampak negatif bagi lingkungan, bertambahnya kebutuhan pupuk bagi tanaman membuat petani mengeluarkan biaya

lebih dalam usaha taninya. Dampaknya adalah pendapatan petani saat panen berkurang, bahkan jika harga mulai turun tidak jarang petani mengalami kerugian dan akhirnya cabai yang sudah siap panen tidak di panen dan dibiarkan sampai membusuk. Permasalahan tersebut diharapkan diselesaikan dengan kembali merangkul petani-petani dalam program penyuluhan, karena dengan melakukan penyuluhan SDM petani akan meningkat sehingga nantinya akan berdampak pada kesejahteraan petani dan keberlanjutan usaha taninya.

5.3.2. Aspek Ekonomi Produksi

Aspek ekonomi Produksi menjadi atribut dengan tingkat kepentingan paling rendah. Aspek ekonomi produksi sendiri terdiri dari 3 taraf yaitu kebijakan harga pupuk, kebijakan harga benih, kebijakan harga hasil panen. Kebijakan harga pupuk menjadi taraf dengan utilitas tertinggi seperti yang ada pada lampiran 8. Hal tersebut bisa disebabkan kebutuhan akan pupuk dalam usaha tani cabai yang sangat tinggi. Tinggi atau rendahnya harga pupuk dapat mempengaruhi tingkat pendapatan petani, terlebih lagi petani sangat bergantung pada pupuk kimia. Penelitian yang dilakukan oleh Adam *et al* (2017) menunjukkan bahwa rendahnya harga pupuk dapat menguntungkan bagi petani-petani kecil yang ada di Malawi yaitu salah satu Negara di Afrika Timur.

Petani mengaku akhir-akhir ini terjadi kelangkaan pupuk bersubsidi sehingga mau tidak mau petani terpaksa membeli pupuk non subsidi yang harganya jauh lebih mahal daripada pupuk bersubsidi. Kelangkaan pupuk bersubsidi juga membuat petani harus menambah modal usaha taninya, sementara harga dari komoditas cabai sangat fluktuatif sehingga dampaknya penghasilan petani menurun dan tidak jarang merugi. Petani mengharapkan masalah harga pupuk ini dapat segera dicarikan solusi oleh pemerintah terkait, dan petani berharap pupuk bersubsidi dapat diberikan kembali dengan prosedur yang lebih mudah dijangkau dan merata kepada setiap petani.

5.3.3. Aspek Pasar

Aspek pasar menjadi atribut yang memiliki tingkat kepentingan tertinggi kedua. Aspek pasar sendiri terdiri dari 3 taraf diantaranya kebijakan pembelian hasil pertanian, pengadaan pasar komoditas, dan penyebaran informasi. Kebijakan pembelian hasil pertanian menjadi taraf dengan utilitas tertinggi yang seperti pada lampiran 8. Hal itu bisa disebabkan oleh komoditas cabai merupakan suatu komoditas yang memiliki tingkat fluktuasi harga yang sangat tinggi. Fluktuasi harga dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti permintaan tinggi, sementara ketersediaan rendah, kondisi ekonomi makro (depresiasi mata uang terhadap mata uang utama dunia dan spekulasi di pasar pertanian), gangguan cuaca dan kebijakan pemerintah (Estrades and Terra, 2012). Penelitian yang dilakukan oleh Naully (2017) menemukan bahwa dalam enam tahun terakhir terjadi fluktuasi harga cabai, fluktuasi tersebut disebabkan waktu tanam cabai yang sangat dipengaruhi cuaca. Fluktuasi ini terkadang menguntungkan dan lebih sering merugikan untuk petani, jika harga cabai melonjak tinggi pendapatan petani bisa melonjak drastis, kondisi seperti itu membuat petani lain yang belum menanam cabai tergiur dengan untung besar, sehingga banyak yang menanam cabai secara bersamaan, sehingga pada saat banyak petani yang menanam cabai secara bersamaan pada saat panen pasokan cabai juga melonjak drastis sementara permintaan konsumen tetap, hal inilah yang membuat harga cabai turun dan petani mengalami kerugian. Petani sendiri cenderung lebih suka harga stabil, dikarenakan resiko kerugian dapat diminimalisir. Pemerintah harus lebih jeli dalam memilih kebijakan, dan bisa melihat dampak positif yang bisa diberikan suatu kebijakan sehingga dapat berdampak lebih baik dalam jangka waktu yang panjang.

Kebijakan pembelian hasil pertanian dianggap sangat penting oleh petani kecil. Sehingga pada saat harga sedang turun drastis pemerintah dapat membeli hasil panen petani dengan harga yang telah ditetapkan sebelumnya. Kebijakan tersebut sebenarnya telah diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Indonesia nomor 5 tahun 2015 yang memberikan tugas kepada Badan Ketahanan Pangan untuk melakukan pengkajian kebijakan di bidang pemasaran hasil pertanian tentang stabilisasi harga dan harga pokok pembelian di bidang pertanian. Pembelian pernah dilakukan oleh pemerintah terhadap hasil panen dari petani cabai di Desa Siman,

prosesnya melalui ketua kelompok tani yang kemudian melakukan pengumpulan hasil panen petani di desa tersebut, hal ini dirasa bisa membantu petani untuk menghindari kerugian, yang dampaknya petani dapat melakukan usaha taninya untuk musim musim selanjutnya.

Tabel 11. Nilai Utilitas Agregat Aspek Kebijakan

Aspek Kebijakan	Taraf	Utility	Std. Error
Teknis_Produksi	Pembangunan Irigasi	-.763	.000
	Perbaikan tek. UT - Demo plot	.208	.000
	Perbaikan tek. UT - Penyuluhan	.555	.000
EkonomiProduksi	Kebijakan harga Pupuk	.570	.000
	Kebijakan harga benih	-.921	.000
	Harga Hasil panen	.351	.000
Pasar	Keb. Pembelian hasil pertanian	.124	.000
	Pengadaan pasar komoditas	-.187	.000
	Penyebaran Informasi	.063	.000
Constant		12.339	.000

Sumber: Analisis Data Primer, 2018

Pada tabel dapat dilihat bahwa analisis conjoint berupa estimasi nilai utilitas dari 3 atribut. Utilitas tersebut dilihat dari setiap kebijakan, bukan dilihat dari nilai utilitas secara keseluruhan. Hasil analisis di atas memperlihatkan kombinasi terbaik antara 3 aspek kebijakan tersebut. Melalui penelitian ini, peneliti berharap bisa menjadikan suatu gambaran bagi pemerintah untuk menawarkan suatu kebijakan kepada petani cabai berdasarkan preferensi petani terhadap beberapa pilihan kebijakan yang terdapat didalam masing-masing atribut.

Dari 3 aspek kebijakan yang telah dianalisis, terdapat aspek yang memiliki nilai utilitas tertinggi. Pada aspek teknis terdapat 3 taraf, dimana hasilnya kebijakan perbaikan teknis usaha tani – penyuluhan memiliki nilai utilitas tertinggi. Pada aspek ekonomi produksi taraf yang memiliki taraf tertinggi adalah kebijakan harga pupuk, dan taraf dengan nilai tertinggi pada aspek pasar adalah kebijakan pembelian hasil pertanian. Sehingga dapat disimpulkan paket kebijakan yang dapat pemerintah tawarkan pada petani cabai adalah kebijakan perbaikan teknis usaha tani – penyuluhan, kebijakan harga pupuk, dan kebijakan pembelian hasil panen. Dengan

paket kebijakan di atas diharapkan dapat menjadi solusi dari permasalahan yang dialami oleh petani cabai, sehingga dampaknya kesejahteraan petani dan keberlanjutan usahatani dapat terjamin.

Analisis menunjukkan ada ketekaitan antara satu kebijakan dan kebijakan lainnya. Untuk mewujudkan kesejahteraan hal pertama yang harus diperbaiki adalah SDM petani itu sendiri, karena petani memegang peranan yang paling penting dalam kegiatan usaha tani. Pemerintah bisa mulai mendampingi kelompok tani melalui penyuluh pertanian yang berkompeten. Petugas penyuluhan merupakan seseorang yang mempunyai tugas pokok untuk memberikan pendidikan yang bersifat nonformal kepada petani dan keluarganya tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan usahatani agar petani dapat memperbaiki ataupun meningkatkan kesejahteraannya.

5.4. Implikasi Kebijakan Terhadap Preferensi Petani Cabai

Penelitian ini menemukan hasil kombinasi kebijakan yang dapat menjadi pertimbangan pemerintah dalam membuat kebijakan pertanian dalam masing-masing aspeknya. Kebijakan perbaikan teknis usaha tani penyuluhan dalam aspek teknis produksi menjadi kebijakan yang harus lebih dahulu diutamakan dalam merumuskan kebijakan komoditas cabai, peneliti menyadari bahwa kecilnya skala penelitian ini membuat hasil dari penelitian ini tidak bisa menjadi pertimbangan merumuskan kebijakan dalam skala nasional. Tetapi pemerintah bisa mempertimbangkan untuk mencoba menerapkan hasil penelitian ini di Desa Siman, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri. Apabila hasil yang didapat berdampak positif bagi petani, pemerintah dapat melakukan penelitian kembali dalam skala yang lebih luas lagi yang akan menjadi dasar pertimbangan bagi pemerintah dalam merumuskan suatu kebijakan komoditas cabai rawit.

5.4.1. Implikasi Kebijakan Aspek teknis

Hasil dari analisis aspek teknis menunjukkan hasil bahwa kebijakan perbaikan teknis usaha tani penyuluhan lebih tinggi dibandingkan dengan kebijakan teknis usaha tani demo plot dan kebijakan pembangunan irigasi. Kebijakan penyuluhan memang seharusnya sudah menjadi kewajiban pemerintah dalam rangka

meningkatkan sumber daya manusia petani cabai. Hal itu dikarenakan sumber daya manusia merupakan hal penting bagi setiap aspek kehidupan termasuk dalam pertanian. Telah banyak penelitian yang dilakukan dan menjelaskan bahwa sumber daya manusia merupakan faktor penting untuk meningkatkan produktivitas maupun tingkat kesejahteraan petani. Pemerintah pusat sendiri sebenarnya telah memiliki program penyuluhan pertanian dalam skala yang luas, dengan penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah untuk memperkuat informasi mengenai pentingnya kebijakan perbaikan teknis usaha tani penyuluhan terhadap petani cabai dalam menjalankan usaha taninya, sehingga pemerintah dapat mengalokasikan dana dan melakukan pengawasan terhadap penyuluhan pertanian dalam tingkat desa.

5.4.2. Implikasi Kebijakan Aspek Ekonomi Produksi

Hasil analisis dari aspek ekonomi produksi menunjukkan bahwa kebijakan harga pupuk menjadi kebijakan yang paling diinginkan petani cabai Desa Siman dibandingkan dengan kebijakan harga hasil panen dan kebijakan benih. Dalam implikasinya kebijakan harga pupuk bisa dilakukan dengan cara mengaktifkan kembali subsidi pupuk dan mempermudah petani untuk mengaksesnya. Ketersediaan dan kemudahan akses pupuk bersubsidi akan sangat membantu petani cabai dalam kegiatan usaha taninya, telah banyak penelitian yang dilakukan menjelaskan bahwa rendahnya harga pupuk dapat membantu petani. Pemerintah dapat turun langsung dalam pemberian pupuk bersubsidi ini kepada petani, sehingga petani yang masuk dalam kelompok tani maupun tidak termasuk dalam kelompok dapat mengakses pupuk ini secara merata.

5.4.3. Implikasi Kebijakan Aspek Pasar

Hasil analisis pada aspek pasar menunjukkan bahwa kebijakan pembelian hasil pertanian menjadi kebijakan yang paling diinginkan oleh petani. Hal itu disebabkan karena fluktuasi harga cabai rawit sangat tinggi dapat sewaktu-waktu dapat membuat petani merugi, sehingga pada saat harga cabai sedang turun drastis pemerintah dapat turun tangan dengan melakukan pembelian hasil panen cabai petani. Pemerintah pusat sendiri sebenarnya telah mengatur kebijakan pembelian hasil pertanian ini. Pemerintah dapat berkoordinasi dengan ketua kelompok tani di

Desa Siman untuk mengumpulkan hasil panen dari setiap petani di desa siman untuk kemudian dibeli oleh pemerintah dengan harga di atas harga pokok penjualan sehingga akan tetap memberikan keuntungan bagi pihak petani. Kebijakan pembelian hasil pertanian harus dilakukan oleh pemerintah sebagai bentuk perlindungan pemerintah kepada petani yang berdampak pada keberlanjutan usaha tani.



VI. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Penelitian tentang preferensi petani terhadap aspek kebijakan-kebijakan pertanian pada komoditas cabai di Desa Siman, kecamatan kepung, kabupaten Kediri, provinsi Jawa Timur yang menggunakan analisis conjoint sebagai alat yang dapat membantu mengukur preferensi petani cabai terhadap 3 atribut kebijakan yaitu aspek teknis produksi, aspek ekonomi produksi, dan aspek pasar. Dari hasil analisis ditemukan hasil berupa kombinasi kebijakan terbaik berdasarkan tiap aspek yaitu kebijakan teknis usaha tani penyuluhan pada aspek teknis produksi, kebijakan harga pupuk pada aspek ekonomi produksi, dan kebijakan pembelian hasil pertanian pada aspek pasar. Hasil analisis juga menunjukkan aspek yang paling penting berturut turut adalah aspek teknis produksi 36.801%, aspek pasar 36.760%, dan terakhir adalah aspek ekonomi produksi 26.438%. Dari hasil Analisis *conjoint* tersebut mengindikasikan bahwa petani cabai di Desa Siman merasa perlu ada perbaikan dalam sistem teknis produksinya.

Analisis deskriptif menunjukkan usia petani didominasi pada usia produktif yaitu 15-64 tahun, dengan tingkat pendidikan tamat Sekolah Dasar, jumlah tanggungan keluarga 3-4 orang, dan luas lahan $<0.25 m^2$. Berdasarkan hasil analisis preferensi petani dapat diimplikasikan oleh pemerintah dengan menjadikan Desa Siman sebagai desa percontohan dalam membuat suatu paket kebijakan yang nantinya jika perkembangan sosial maupun ekonomi petani cabai di Desa Siman mengarah positif maka pemerintah dapat menerapkan kebijakan serupa dengan cakupan yang lebih luas.

6.2. Saran

1. Kepada Pemerintah

Pemerintah harus mengaktifkan kembali penyuluhan terhadap petani mengenai teknis produksi, mengingat pentingnya penyuluhan yang dapat meningkatkan SDM petani yang dapat berdampak pada produktifitas petani. Hal ini didasarkan dari hasil analisis conjoint petani lebih menginginkan aspek teknis produksi dan taraf perbaikan teknis usaha tani – penyuluhan memiliki utilitas tertinggi.

2. Kepada Petani

Petani diharapkan lebih aktif dalam kelompok tani, sehingga dapat saling berdiskusi dan dapat mengakses informasi maupun kebijakan-kebijakan pemerintah lebih mudah.

3. Kepada Peneliti

Peneliti diharapkan dapat melakukan lebih jauh tentang dampak preferensi petani tentang kebijakan pemerintah terhadap produktifitas usaha taninya.



DAFTAR PUSTAKA

- Adam M. Komarek, Sophie Drogue, Roza Chenoune, James Hawkins, Siwa Msangi, Hatem Belhouchette, Guillermo Flichmana, *Agricultural household effects of fertilizer price changes for smallholder farmers in central Malawi*. Agricultural System. Volume 154, Pages 168-178.
- Anwarudin, M. J. S, Sayekti, A. L. Marendra, Aditia, Hilman, Yusdar. 2015. *Dinamika Produksi Dan Volatilitas Harga Cabai: Antisipasi Strategi Dan Kebijakan Pengembangan*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura. Jakarta.
- Arifin, Bustanul. 2003. *Pembangunan Pertanian: Paradigma Kebijakan Dan Strategi Revitalisasi*. Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta.
- Aziza, Tri Noor. 2009. *Menilik Kebijakan Pembangunan Pertanian*. Jurnal Borneo Administrator, 5(2).
- Badan Pusat Statistik. 2015. *Tenaga Kerja Seluruh Sektor*.
- Banoewidjojo, Moeljadi. 1983. *Pembangunan Pertanian*. Usaha Nasional. Surabaya.
- Bekele, Wagayehu. (2006). *Analysis of Farmers' Preferences for Development Intervention Programs: A Case Study of Subsistence Farmers from East Ethiopian Highlands*. *African Development Review-revue Africaine De Developpement*.
- Bilson, Simamora. 2004. *Riset Pemasaran*. Gramedia Utama. Jakarta.
- Boyke, K.J., Holmes, T.P., Teisl, M.F., Roe, B. 2001. *A comparasion of conjoint analysis response formats*. American Journal of Agricultural Economics 83(2), 441-454.
- Estrades, C., & Terra, M.I. (2012), *Commodity Prices, Trade, and Poverty in Uruguay*. Food Policy 37, pp 58-66.

- Green Paul E., A. M. Krieger and T. Vavra (1999), "*Evaluating EZ-Pass: Using Conjoint Analysis to Assess Consumer Response to a New Tollway Technology*" *Marketing Research*. Vol. (Summer), 5-16.
- Gudono. 2011. *Analisis Data Multivariat*. BPFE. Yogyakarta.
- Hair, et al. 1998. *Multivariate Data Analysis (Fifth Edition)*. Prentice Hall. New Jersey.
- Hallet, Graham. 1971. *The Economics of Agricultural Policy*. Oxford Basil Black Well. Oxford.
- Hanafie, Rita. 2010. *Pengantar Ekonomi Pertanian*. ANDI. Yogyakarta.
- Hutauruk, E.H. (2009) *Pengaruh Pendidikan dan Pengalaman Petani Terhadap Tingkat produktifitas Tanaman Kopi dan Kontribusinya Terhadap Perkembangan Wilayah di Kabupaten Tapanuli Utara*. Medan
- Kardes FR .2002. *Consumer behaviour and managerial decision making (Second Edition)*. Prentice-Hall. India.
- Kementan RI. 2016. *Outlook: Komoditas Pertanian Subsektor Hortikultura*. Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Kementerian Pertanian. Jakarta.
- Kinasih, et al. 2015. *Analisis Ketersediaan Air terhadap Potensi Budidaya Kedelai (Glycine max (L) Merrill) di Daerah Irigasi Siman*. Vol 2, No 2.
- Luankali, Bernadus. 2007. *Analisis Kebijakan Publik dalam Proses Pengambilan Keputusan*. Amelia Press. Jakarta.
- Maramis, Arya Yuwedly. 2018. *Dampak Impor Cabai Dari Tiongkok Terhadap Perekonomian Indonesia Tahun 2010-2015*. JOM FISIP Vol. 5 No. 1.
- Mattjik, A.A dan I M Sumertajaya. 2002. *Perancangan Percobaan dengan Aplikasi SAS dan Minitab, Jilid I*. IPB Press. Bogor.
- Mittenzwei, Klaus & Mann, Stefan & Refsgaard, Karen & Kvakkestad, Valborg. 2015. *Hot Cognition In Agricultural Policy Preferences In Norway?. Agriculture and Human Values*.

- Mubyarto. 1983. *Politik Pertanian Dan Pembangunan Pedesaan*. Sinar Harapan. Jakarta.
- , 1989. *Pengantar Ekonomi Pertanian*. LP3ES. Jakarta.
- Naully, Dahlia. 2017. *Fluktuasi Dan Disparitas Harga Cabai Di Indonesia*. Universitas Muhammadiyah Jakarta. Jakarta.
- Nawangsih, Abjad Asih. 1994. *Cabai Hot Beauty*. Penebar Swadaya. Jakarta.
- Nicholson W. 2002. *Teori Ekonomi Mikro*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Orazem, Peter F., Daniel M. Otto, and Mark A. Edelman. 1989. *An Analysis of Farmers'. Agricultural Policy Preferences. American Journal of Agricultural Economics*.
- Parel, CP. et. al. 1973. *Sampling Design Procedures*. A/D/C Asia Office. Tanglin.
- Rondhi, M. 2016. *Modul Kebijakan dan Peraturan Bidang Pertanian*. Universitas Jember. Jember.
- Rukka, Hermaya dan Wahab, Arman. 2013. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Motivasi Petani Dalam Pelaksanaan Kegiatan P2bn Di Kecamatan Barru, Kabupaten Barru. *Jurnal Agrisistem*, Vol. 9 No.1
- Rukmana, Rahmat. 2002. *Usaha Tani Cabai Rawit*. Kanisius. Yogyakarta.
- Sadono, Dwi. 2008. *Pemberdayaan Petani: Paradigma Baru Penyuluhan Pertanian Di Indonesia*. *Jurnal Penyuluhan* Vol. 4 No. 1.
- Santoso, S. 2010. *Statistika Multivariat*. PT Elex media Komputindo. Jakarta.
- Saputra. 2000. *Perkembangan Gerak dan Belajar Gerak*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta.
- Sastraatmaja, Entang. 1986. *Penyuluhan pertanian: falsafah, masalah dan strategi*. Alumni. Bandung.
- Schokkaert, E. 1987. *Preference and demand for local public spending*. *Journal of Public Economics* 34 (2): 175-188

- Supandi, Elpha Diana. 2012. *Pendekatan Conjoint Analysis Untuk mengukur Tingkat Preferensi mahasiswa terhadap Layanan Sistem Informasi Akademik UIN Yogyakarta*. Jurnal Fourier Vol.1, No. 1, 1-9.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Sujarweni, V.W. 2014. *SPSS Untuk Penelitian*. Pustaka Baru Press. Yogyakarta.
- Sumarsono, Sonny. 2004. *Metode Riset Sumber Daya Manusia*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Supranto, L.N. 2004. *Analisis Multivariat Arti dan Interpretasi*. Rieka Cipta. Jakarta.
- Tangkilisan, Hesel. 2003. *Kebijakan Publik Yang Membumi: Konsep, Strategi dan Kasus*. YPAPI. Yogyakarta.
- Theresia, Muatha Irene. 2014. *An Analysis of Farmers' Awareness of Agricultural Extention Devolution for Parcipatory Design of Agricultural Extension Programs in Kenya*. University of Nairobi.
- Tolley, George S. 1982. *Agricultural Price Policies and The Developing Countries (A World Bank Publication)*. Baltimore The Johns Hopkins University
- Van Den Ban, A.W. dan H.S Hawkins.1999. *Penyuluhan Pertanian*. Kanisius. Yogyakarta.
- Yulianjaya, Fery dan Hidayat, Kliwon. 2016. *Pola Kemitraan Petani Cabai Dengan Juragan Luar Desa (Studi Kasus Kemitraan di Desa Kucur, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang)*. Volume 27, No. 1, April 2016, Hal. 37-47.



Lampiran 1. Jumlah Produksi Cabai di Kabupaten Kediri Pada Tahun 2014-2016 Berdasarkan Kecamatan

No.	Kecamatan	Produksi (kw)		
		2014	2015	2016
1	Gampengrejo	2167	681	682
2	Grogol	0	0	0
3	Mojo	1484	2031	1443
4	Semen	1016	1093	1110
5	Tarokan	0	0	0
6	Ngadiluwih	2270	844	196
7	Kras	1053	1225	2003
8	Kandat	1388	2269	2033
9	Wates	3721	3645	7149
10	Ngancar	3821	3883	3340
11	Pare	1450	2005	1950
12	Kandangan	985	1270	1030
13	Kepung	10948	40530	42047
14	Puncu	53747	80311	46359
15	Gurah	38473	16633	17661
16	Plosoklaten	15070	16524	8289
17	Papar	2931	1746	4055
18	Plemahan	847	6228	2967
19	Pagu	49614	36604	53946
20	Purwoasri	706	608	285
21	Kunjang	95	407	0
22	Banyakan	217	293	477
23	Ringinrejo	1513	2620	3328
24	Kayenkidul	5152	7946	15565
25	Badas	645	355	212
26	Ngasem	3100	3950	4239
Jumlah		202413	233401	220367

Lampiran 2. Perhitungan Sampel

sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *simple random sampling*. Cara yang digunakan untuk menghitung jumlah responden dalam penelitian ini diambil mewakili keseluruhan populasi ditentukan dengan rumus yang dikemukakan oleh Parel *et al.* (1973). Berikut ini merupakan perhitungan jumlah responden:

$$n = \frac{N Z^2 s^2}{N d^2 + Z^2 s^2}$$

Dimana:

n = ukuran sampel minimum

N = jumlah populasi

Z = nilai ditingkat kepercayaan tertentu, yaitu 95% (dengan nilai sebesar 1,96)

σ^2 = nilai varians dari populasi

d = kesalahan maksimum yang ditoleransi (5%)

Sebelum menghitung ukuran sampel minimum, terlebih dahulu dilakukan pengukuran nilai varians dari sampel (S^2) dengan rumus seperti di bawah ini:

$$s^2 = \frac{n \sum X^2 - (\sum X)^2}{n(n-1)}$$

Dimana:

n = populasi kecil (20 petani)

X = luas lahan yang dimiliki setiap petani

Luas lahan yang dimiliki setiap petani yaitu:

0.3, 0.25, 0.5, 0.2, 0.25, 0.14, 0.2, 0.2, 0.25, 0.3, 0.6, 0.5, 0.3, 0.21, 0.25, 0.5, 0.2, 0.2, 0.5, 0.5, 0.2, 1, 0.6, 0.5, 0.3, 0.2, 0.35, 0.4, 0.25, 0.14

Berikut adalah perhitungannya:

Petani	Luas Lahan (x1)	Luas Lahan (x1 ²)	
1	0.3	0.09	
2	0.25	0.0625	
3	0.5	0.25	
4	0.2	0.04	
5	0.25	0.0625	
6	0.14	0.0196	
7	0.2	0.04	
8	0.2	0.04	
9	0.25	0.0625	
10	0.3	0.09	
11	0.6	0.36	
12	0.5	0.25	
13	0.3	0.09	
14	0.21	0.0441	
15	0.25	0.0625	
16	0.5	0.25	
17	0.2	0.04	
18	0.2	0.04	
19	0.5	0.25	
20	0.5	0.25	
21	0.2	0.04	
22	1	1	
23	0.6	0.36	
24	0.5	0.25	
25	0.3	0.09	
26	0.2	0.04	
27	0.35	0.1225	
28	0.4	0.16	
29	0.25	0.0625	
30	0.14	0.0196	
ΣX1	9.39	ΣX1 ²	3.5483
(ΣX1) ²	82.6281		

$$s^2 = \frac{n \sum_{i=1}^n x_i^2 - (\sum_{i=1}^n x_i)^2}{n(n-1)}$$

$$s^2 = \frac{30 \times 3.4583 - (82.6281)^2}{30(30-1)}$$

$$s^2 = 0.034787$$

Setelah dilakukan pengukuran nilai varians dari sampel (S^2), maka dilakukan pengukuran jumlah sampel minimal yang harus diambil dari total populasi (n). Total populasi petani cabai rawit di Desa Siman sebanyak 390 orang. Berikut ini merupakan pengukuran jumlah sampel minimal yang harus diambil dari total populasi (n) :

$$n = \frac{N Z^2 s^2}{N d^2 + Z^2 s^2}$$

$$n = \frac{390 (1.96)^2 \times 0.034787}{390 (0.05)^2 + (1.96)^2 0.034787}$$

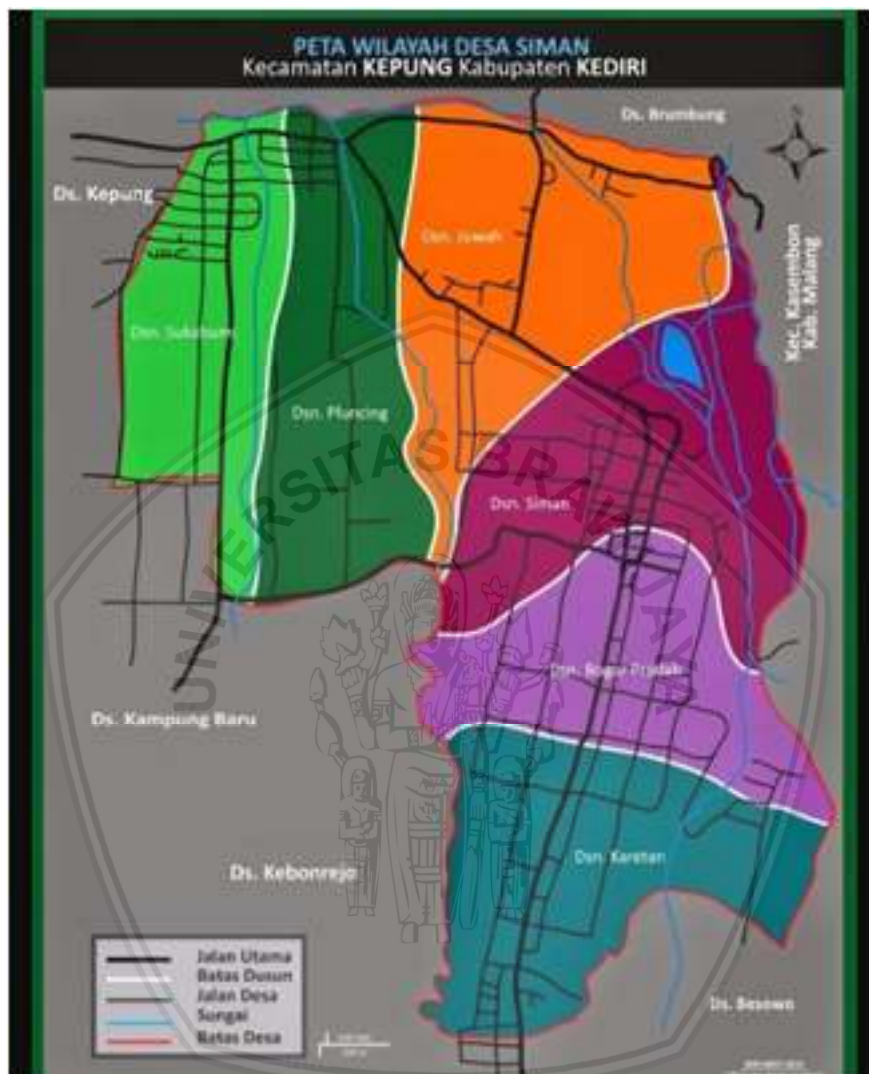
$$n = \frac{390 (3.8416) \times 0.034787}{390 (0.0025) + (3.8416) 0.034787}$$

$$n = \frac{52.1187183}{0.975 + 0.1336377739}$$

$$n = \frac{52.1187183}{1.1086377}$$

$$n = 47,0115 = 47 \text{ orang}$$

Lampiran 3. Peta Wilayah Desa Siman, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri



Lampiran 4. Kuisiioner Penelitian

PERTANIAN- HORTIKULTURA

Komoditas	:						
0.1. No. Kuisiioner	:						
0.2. Enumerator	:						
0.3. Tanggal	:	DD		MM		YY	
0.4. Provinsi	:						
0.5. Kabupaten/Kota	:						
0.6. Kecamatan	:						
0.7. Desa/Kelurahan	:						
0.8. Dusun/ RT/ RW	:						

I. IDENTITAS RUMAH TANGGA (RTG)

1.1. Nama Kepala RTG	:							
1.2. Jenis kelamin KRTG	:	1 Laki-laki/ 2 Perempuan						
1.3. Usia KRTG	:		Tahun					
1.3.a Jenis Petani	:		a. Pemilik dan Penggarap					c. Penggarap bagi hasil
			b. Penyewa dan Penggarap					d. Lainnya
1.3.b Luas lahan diusahakan	:		ha					
1.4. Pendidikan KRTG	:		Keterangan: 1= Tidak sekolah; 2= Tidak tamat SD; 3= Tamat SD; 4 = Tamat SMP; 5= Tamat SMA; 6= Tamat D3; 7= Sarjana/lebih tinggi					
1.5. Lamanya berprofesi sbg petani:			tahun					
1.6. Jml Anggota RTG	:		Orang					

Lampiran 4. (Lanjutan)

No	Nama Kebijakan/ Bantuan Pemerintah	Ada/Tidak (Ya=1; tdk=0)	KEMANFAATAN DIRASAKAN JIKA ADA KEBIJAKAN (5 Sgt sesuai - 1 sgt tidak sesuai)	KEBIJAKAN LEBIH DIINGINKAN (PREFERENSI) (5 sgt diinginkan - 1 sgt tidak diinginkan)
	POKOK KEBIJAKAN			
1	Aspek teknis produksi			
2	Aspek ekonomi produksi			
3	Aspek pasar			
	ASPEK TEKNIS PRODUKSI			
1	Kebijakan pembangunan irigasi			
2	Perbaikan tek. UT - Demo plot			
3	Perbaikan tek. UT - Penyuluhan			
	ASPEK PASAR			
1	Kebijakan pembelian hasil pertanian pemerintah			
2	Kebijakan penyebaran informasi harga pertanian			
3	Pengadaan pasar komoditas			

Lampiran 5. Skor Preferensi Petani

Responden	Aspek Teknik Produksi	Aspek Ekonomi Produksi	Aspek Pasar
1	5	4	2
2	5	4	2
3	5	4	2
4	5	5	2
5	5	5	2
6	5	5	4
7	5	5	3
8	5	5	4
9	5	5	4
10	5	5	4
11	5	3	4
12	5	5	2
13	4	5	5
14	5	4	5
15	5	4	5
16	4	4	5
17	5	4	5
18	5	4	5
19	5	5	4
20	4	4	5
21	4	5	5
22	5	5	4
23	5	5	4
24	5	5	4
25	5	5	4
26	5	4	5
27	5	4	5
28	5	5	3
29	5	4	5
30	5	4	5
31	4	5	5
32	4	5	5
33	5	4	5
34	5	4	5
35	5	4	5
36	5	5	3
37	4	5	5
38	5	5	3

39	4	5	5
40	4	5	5
41	4	5	5
42	4	5	5
43	5	1	4
44	4	5	5
45	5	5	2
46	5	5	2
47	4	5	5



Lampiran 5. (Lanjutan)

Responden	Aspek Teknik Produksi			Aspek Ekonomi Produksi			Aspek Pasar		
	Pembangunan Irigasi	Perbaikan tek. UT - Demo plot	Perbaikan tek. UT - Penyuluhan	Kebijakan harga pupuk	Kebijakan harga benih	Keb. pengananaan pasca panen	Keb. Pembelian hasil pertanian	pengadaan pasar komoditas	Penyebaran Informasi
1	1	4	4	5	5	4	2	3	5
2	1	4	4	5	5	4	2	3	5
3	1	4	4	5	5	4	2	3	5
4	1	4	4	5	5	4	2	3	5
5	1	4	4	5	5	4	2	3	5
6	3	4	4	5	5	4	2	3	5
7	1	4	4	5	5	4	2	3	5
8	3	4	4	5	5	4	2	3	5
9	3	4	4	5	5	4	2	3	5
10	3	4	4	5	5	4	2	3	5
11	1	4	4	5	5	4	2	3	5
12	1	4	4	5	5	4	2	3	5
13	3	4	4	5	3	5	5	4	3
14	3	4	4	5	3	5	5	4	3
15	3	4	4	5	3	5	5	4	3
16	3	4	4	5	3	5	5	4	3
17	3	4	4	5	3	5	5	4	3

18	3	4	4	5	3	5	5	4	3
19	1	1	4	5	4	5	5	3	5
20	3	4	4	5	3	5	5	4	3
21	3	4	4	5	3	5	5	4	3
22	1	1	4	5	4	5	2	3	5
23	1	1	4	5	4	5	5	3	5
24	1	1	4	5	4	5	5	3	5
25	1	1	4	5	4	5	5	3	5
26	4	4	5	5	2	5	4	3	2
27	1	5	5	5	3	5	5	4	3
28	2	5	5	5	3	5	5	4	3
29	4	5	5	5	3	5	5	2	3
30	3	5	5	4	3	5	5	4	3
31	3	2	4	5	3	5	5	4	3
32	3	2	4	5	3	5	5	4	3
33	3	2	4	4	3	5	5	4	2
34	2	5	5	5	3	5	4	3	2
35	4	4	5	4	2	5	5	4	3
36	5	4	3	5	3	5	4	4	3
37	5	4	3	5	3	5	2	3	4
38	5	4	3	5	3	5	3	3	2
39	5	4	3	5	3	5	3	3	4
40	5	4	3	5	3	5	3	3	4
41	5	4	3	5	2	5	2	3	4
42	5	4	3	5	3	5	3	5	5
43	2	4	5	5	3	5	3	5	4
44	5	4	3	5	3	5	3	3	4

45	5	4	3	5	3	5	3	4	4
46	5	4	3	5	3	5	3	3	4
47	5	4	3	5	3	5	3	3	4



Lampiran 6. Macam-Macam Stimuli

NO	Aspek Teknis Produksi	Aspek Ekonomi Produksi	Aspek Pasar
1	Perbaikan tek. UT - Penyuluhan	Harga Hasil panen	Keb. Pembelian hasil pertanian
2	Perbaikan tek. UT - Penyuluhan	Kebijakan harga Pupuk	Keb. Pembelian hasil pertanian
3	Pembangunan Irigasi	Kebijakan harga Pupuk	Penyebaran Informasi
4	Pembangunan Irigasi	Kebijakan harga benih	Pengadaan pasar komoditas
5	Pembangunan Irigasi	Kebijakan harga benih	Keb. Pembelian hasil pertanian
6	Pembangunan Irigasi	Kebijakan harga benih	Penyebaran Informasi
7	Perbaikan tek. UT - Demo plot	Kebijakan harga Pupuk	Pengadaan pasar komoditas
8	Pembangunan Irigasi	Harga Hasil panen	Keb. Pembelian hasil pertanian
9	Perbaikan tek. UT - Penyuluhan	Harga Hasil panen	Penyebaran Informasi
10	Perbaikan tek. UT - Penyuluhan	Kebijakan harga benih	Keb. Pembelian hasil pertanian
11	Perbaikan tek. UT - Penyuluhan	Kebijakan harga Pupuk	Pengadaan pasar komoditas
12	Perbaikan tek. UT - Penyuluhan	Kebijakan harga Pupuk	Penyebaran Informasi
13	Perbaikan tek. UT - Demo plot	Kebijakan harga benih	Pengadaan pasar komoditas
14	Perbaikan tek. UT - Demo plot	Harga Hasil panen	Pengadaan pasar komoditas
15	Pembangunan Irigasi	Harga Hasil panen	Penyebaran Informasi

16	Pembangunan Irigasi	Kebijakan harga Pupuk	Keb. Pembelian hasil pertanian
17	Perbaikan tek. UT - Penyuluhan	Harga Hasil panen	Pengadaan pasar komoditas
18	Perbaikan tek. UT - Penyuluhan	Kebijakan harga benih	Penyebaran Informasi
19	Perbaikan tek. UT - Demo plot	Kebijakan harga Pupuk	Keb. Pembelian hasil pertanian
20	Perbaikan tek. UT - Demo plot	Kebijakan harga benih	Penyebaran Informasi
21	Pembangunan Irigasi	Kebijakan harga Pupuk	Pengadaan pasar komoditas
22	Perbaikan tek. UT - Demo plot	Kebijakan harga benih	Keb. Pembelian hasil pertanian
23	Perbaikan tek. UT - Demo plot	Harga Hasil panen	Penyebaran Informasi
24	Perbaikan tek. UT - Penyuluhan	Kebijakan harga benih	Pengadaan pasar komoditas
25	Perbaikan tek. UT - Demo plot	Harga Hasil panen	Keb. Pembelian hasil pertanian
26	Perbaikan tek. UT - Demo plot	Kebijakan harga Pupuk	Penyebaran Informasi
27	Pembangunan Irigasi	Harga Hasil panen	Pengadaan pasar komoditas

Lampiran 7. Hasil Kombinasi Stimuli Masing-Masing Responden

Responden	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	9.6	10.56	8.4	7.44	6.96	8.4	11.04	6	11.04	10.56	11.04	12	11.04	10.08	7.44
2	9.6	10.56	8.4	7.44	6.96	8.4	11.04	6	11.04	10.56	11.04	12	11.04	10.08	7.44
3	9.6	10.56	8.4	7.44	6.96	8.4	11.04	6	11.04	10.56	11.04	12	11.04	10.08	7.44
4	10.56	11.76	9.6	8.64	8.16	9.6	12.24	6.96	12	11.76	12.24	13.2	12.24	11.04	8.4
5	10.56	11.76	9.6	8.64	8.16	9.6	12.24	6.96	12	11.76	12.24	13.2	12.24	11.04	8.4
6	11.52	12.72	14.4	12.48	11.52	14.4	13.68	10.32	14.4	12.72	13.68	15.6	13.68	12.48	13.2
7	11.04	12.24	10.8	9.36	8.64	10.8	12.96	7.44	13.2	12.24	12.96	14.4	12.96	11.76	9.6
8	11.52	12.72	14.4	12.48	11.52	14.4	13.68	10.32	14.4	12.72	13.68	15.6	13.68	12.48	13.2
9	11.52	12.72	14.4	12.48	11.52	14.4	13.68	10.32	14.4	12.72	13.68	15.6	13.68	12.48	13.2
10	11.52	12.72	14.4	12.48	11.52	14.4	13.68	10.32	14.4	12.72	13.68	15.6	13.68	12.48	13.2
11	9.6	10.32	9.6	7.68	6.72	9.6	11.28	6	12.48	10.32	11.28	13.2	11.28	10.56	8.88
12	10.56	11.76	9.6	8.64	8.16	9.6	12.24	6.96	12	11.76	12.24	13.2	12.24	11.04	8.4
13	15.84	15.84	12.48	11.28	12.48	10.08	14.64	14.88	13.44	13.44	14.64	13.44	12.24	14.64	12.48
14	15.6	15.6	12	11.28	12.48	10.08	14.4	14.4	13.2	13.68	14.4	13.2	12.48	14.4	12
15	15.6	15.6	12	11.28	12.48	10.08	14.4	14.4	13.2	13.68	14.4	13.2	12.48	14.4	12
16	14.64	14.64	11.28	10.56	11.76	9.36	13.44	13.68	12.24	12.72	13.44	12.24	11.52	13.44	11.28
17	15.6	15.6	12	11.28	12.48	10.08	14.4	14.4	13.2	13.68	14.4	13.2	12.48	14.4	12
18	15.6	15.6	12	11.28	12.48	10.08	14.4	14.4	13.2	13.68	14.4	13.2	12.48	14.4	12
19	15.6	15.6	12	8.88	10.8	10.8	10.08	12	15.6	14.4	13.68	15.6	8.88	10.08	12
20	14.64	14.64	11.28	10.56	11.76	9.36	13.44	13.68	12.24	12.72	13.44	12.24	11.52	13.44	11.28
21	15.84	15.84	12.48	11.28	12.48	10.08	14.64	14.88	13.44	13.44	14.64	13.44	12.24	14.64	12.48
22	12.72	12.72	12	8.88	7.92	10.8	10.08	9.12	15.6	11.52	13.68	15.6	8.88	10.08	12
23	15.6	15.6	12	8.88	10.8	10.8	10.08	12	15.6	14.4	13.68	15.6	8.88	10.08	12

24	15.6	15.6	12	8.88	10.8	10.8	10.08	12	15.6	14.4	13.68	15.6	8.88	10.08	12
25	15.6	15.6	12	8.88	10.8	10.8	10.08	12	15.6	14.4	13.68	15.6	8.88	10.08	12
26	15.6	15.6	12	10.32	11.52	9.12	13.2	14.4	13.2	12.72	14.4	13.2	10.32	13.2	12
27	16.8	16.8	9.6	8.88	10.08	7.68	15.6	12	14.4	14.88	15.6	14.4	13.68	15.6	9.6
28	15.6	15.6	10.56	8.88	9.6	8.16	14.88	12	14.16	13.2	14.88	14.16	12.48	14.88	10.56
29	16.8	16.8	13.2	10.08	13.68	11.28	13.2	15.6	14.4	14.88	13.2	14.4	11.28	13.2	13.2
30	16.8	15.84	11.04	11.28	12.48	10.08	14.64	14.4	14.4	14.88	14.64	13.44	13.68	15.6	12
31	15.84	15.84	12.48	11.28	12.48	10.08	12.72	14.88	13.44	13.44	14.64	13.44	10.32	12.72	12.48
32	15.84	15.84	12.48	11.28	12.48	10.08	12.72	14.88	13.44	13.44	14.64	13.44	10.32	12.72	12.48
33	15.6	14.64	9.84	11.28	12.48	8.88	11.04	14.4	12	13.68	13.44	11.04	10.08	12	10.8
34	15.6	15.6	9.6	8.88	10.08	7.68	14.4	12	13.2	13.68	14.4	13.2	12.48	14.4	9.6
35	16.8	15.84	12.24	11.52	12.72	10.32	13.44	15.6	14.4	13.92	14.64	13.44	11.52	14.4	13.2
36	12.48	12.48	14.16	12.48	12.48	11.76	13.68	14.88	11.76	10.08	12.48	11.76	11.28	13.68	14.16
37	11.28	11.28	15.6	12	10.8	13.2	13.44	13.2	13.68	8.88	12.48	13.68	11.04	13.44	15.6
38	11.76	11.76	13.44	11.76	11.76	11.04	12.96	14.16	11.04	9.36	11.76	11.04	10.56	12.96	13.44
39	12.48	12.48	15.6	12	12	13.2	13.44	14.4	13.68	10.08	12.48	13.68	11.04	13.44	15.6
40	12.48	12.48	15.6	12	12	13.2	13.44	14.4	13.68	10.08	12.48	13.68	11.04	13.44	15.6
41	11.28	11.28	15.6	10.8	9.6	12	13.44	13.2	13.68	7.68	12.48	13.68	9.84	13.44	15.6
42	12.48	12.48	16.8	14.4	12	14.4	15.84	14.4	14.88	10.08	14.88	14.88	13.44	15.84	16.8
43	10.08	10.08	7.44	7.92	6	6.96	10.8	6.48	11.04	9.6	12	11.04	10.32	10.8	7.44
44	12.48	12.48	15.6	12	12	13.2	13.44	14.4	13.68	10.08	12.48	13.68	11.04	13.44	15.6
45	11.04	11.04	13.92	11.52	11.04	11.52	12.72	13.44	11.52	8.64	11.52	11.52	10.32	12.72	13.92
46	11.04	11.04	13.92	11.04	11.04	11.52	12.24	13.44	11.52	8.64	11.04	11.52	9.84	12.24	13.92
47	12.48	12.48	15.6	12	12	13.2	13.44	14.4	13.68	10.08	12.48	13.68	11.04	13.44	15.6

Lampiran 7. (Lanjutan Stimuli 16-27)

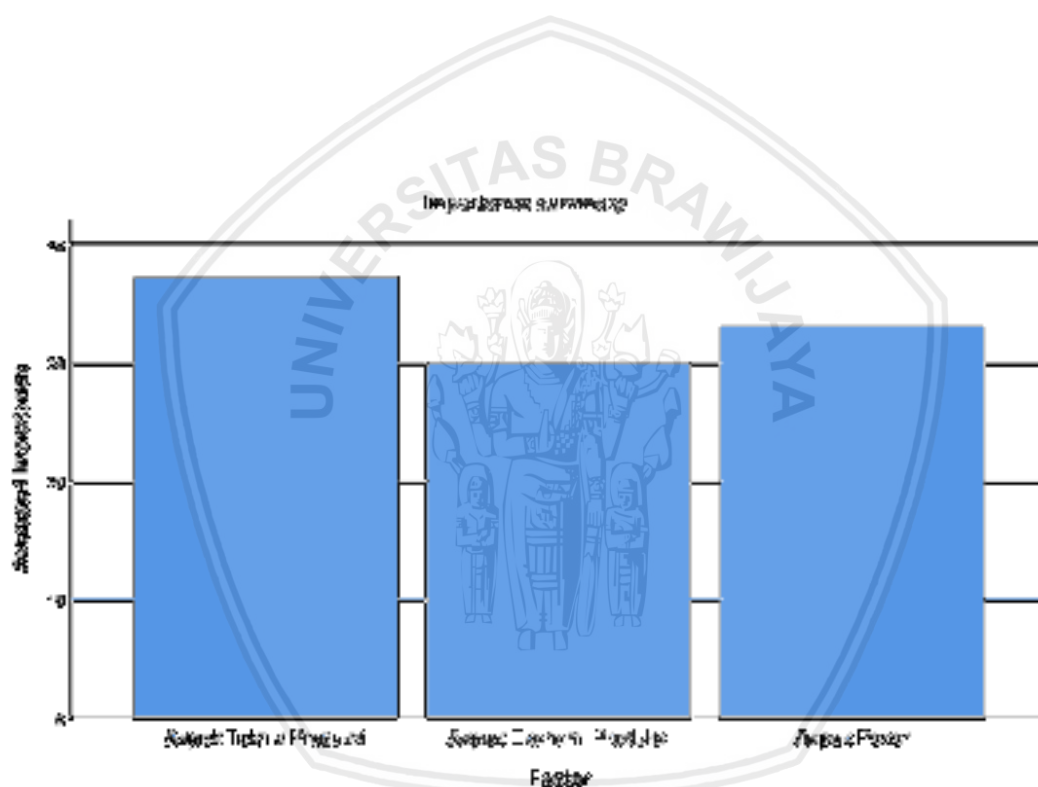
Responden	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	6.96	10.08	12	10.56	12	7.44	10.56	11.04	11.04	9.6	12	6.48
2	6.96	10.08	12	10.56	12	7.44	10.56	11.04	11.04	9.6	12	6.48
3	6.96	10.08	12	10.56	12	7.44	10.56	11.04	11.04	9.6	12	6.48
4	8.16	11.04	13.2	11.76	13.2	8.64	11.76	12	12.24	10.56	13.2	7.44
5	8.16	11.04	13.2	11.76	13.2	8.64	11.76	12	12.24	10.56	13.2	7.44
6	11.52	12.48	15.6	12.72	15.6	12.48	12.72	14.4	13.68	11.52	15.6	11.28
7	8.64	11.76	14.4	12.24	14.4	9.36	12.24	13.2	12.96	11.04	14.4	8.16
8	11.52	12.48	15.6	12.72	15.6	12.48	12.72	14.4	13.68	11.52	15.6	11.28
9	11.52	12.48	15.6	12.72	15.6	12.48	12.72	14.4	13.68	11.52	15.6	11.28
10	11.52	12.48	15.6	12.72	15.6	12.48	12.72	14.4	13.68	11.52	15.6	11.28
11	6.72	10.56	13.2	10.32	13.2	7.68	10.32	12.48	11.28	9.6	13.2	6.96
12	8.16	11.04	13.2	11.76	13.2	8.64	11.76	12	12.24	10.56	13.2	7.44
13	14.88	14.64	11.04	15.84	11.04	13.68	13.44	13.44	12.24	15.84	13.44	13.68
14	14.4	14.4	11.28	15.6	11.28	13.2	13.68	13.2	12.48	15.6	13.2	13.2
15	14.4	14.4	11.28	15.6	11.28	13.2	13.68	13.2	12.48	15.6	13.2	13.2
16	13.68	13.44	10.32	14.64	10.32	12.48	12.72	12.24	11.52	14.64	12.24	12.48
17	14.4	14.4	11.28	15.6	11.28	13.2	13.68	13.2	12.48	15.6	13.2	13.2
18	14.4	14.4	11.28	15.6	11.28	13.2	13.68	13.2	12.48	15.6	13.2	13.2
19	12	13.68	14.4	12	10.8	10.08	10.8	12	12.48	12	12	10.08
20	13.68	13.44	10.32	14.64	10.32	12.48	12.72	12.24	11.52	14.64	12.24	12.48
21	14.88	14.64	11.04	15.84	11.04	13.68	13.44	13.44	12.24	15.84	13.44	13.68
22	9.12	13.68	14.4	9.12	10.8	10.08	7.92	12	12.48	9.12	12	10.08
23	12	13.68	14.4	12	10.8	10.08	10.8	12	12.48	12	12	10.08
24	12	13.68	14.4	12	10.8	10.08	10.8	12	12.48	12	12	10.08

25	12	13.68	14.4	12	10.8	10.08	10.8	12	12.48	12	12	10.08
26	14.4	14.4	10.32	14.4	9.12	13.2	11.52	12	11.52	14.4	12	13.2
27	12	15.6	12.48	16.8	12.48	10.8	14.88	14.4	13.68	16.8	14.4	10.8
28	12	14.88	11.76	15.6	11.76	11.28	13.2	14.16	12.48	15.6	14.16	11.28
29	15.6	13.2	12.48	16.8	12.48	12	14.88	14.4	11.28	16.8	14.4	12
30	13.44	15.6	12.48	15.84	12.48	12.24	14.88	14.4	13.68	16.8	13.44	13.2
31	14.88	14.64	11.04	13.92	9.12	13.68	11.52	11.52	12.24	13.92	11.52	13.68
32	14.88	14.64	11.04	13.92	9.12	13.68	11.52	11.52	12.24	13.92	11.52	13.68
33	13.44	14.4	10.08	12.24	7.68	12.24	11.28	9.6	12.48	13.2	8.64	13.2
34	12	14.4	11.28	15.6	11.28	10.8	13.68	13.2	12.48	15.6	13.2	10.8
35	14.64	15.6	11.52	14.64	10.32	13.44	12.72	13.2	12.72	15.6	12.24	14.4
36	14.88	12.48	9.36	13.68	10.56	14.88	11.28	12.96	10.08	13.68	12.96	14.88
37	13.2	12.48	11.28	12.24	12.24	14.4	9.84	14.64	10.08	12.24	14.64	14.4
38	14.16	11.76	8.64	12.96	9.84	14.16	10.56	12.24	9.36	12.96	12.24	14.16
39	14.4	12.48	11.28	13.44	12.24	14.4	11.04	14.64	10.08	13.44	14.64	14.4
40	14.4	12.48	11.28	13.44	12.24	14.4	11.04	14.64	10.08	13.44	14.64	14.4
41	13.2	12.48	10.08	12.24	11.04	14.4	8.64	14.64	8.88	12.24	14.64	14.4
42	14.4	14.88	12.48	13.44	13.44	16.8	11.04	15.84	12.48	13.44	15.84	16.8
43	6.48	12	10.56	8.88	9.36	8.4	8.4	9.84	11.52	8.88	9.84	8.4
44	14.4	12.48	11.28	13.44	12.24	14.4	11.04	14.64	10.08	13.44	14.64	14.4
45	13.44	11.52	9.12	12.24	10.32	13.92	9.84	12.72	9.12	12.24	12.72	13.92
46	13.44	11.04	9.12	12.24	10.32	13.44	9.84	12.72	8.64	12.24	12.72	13.44
47	14.4	12.48	11.28	13.44	12.24	14.4	11.04	14.64	10.08	13.44	14.64	14.4

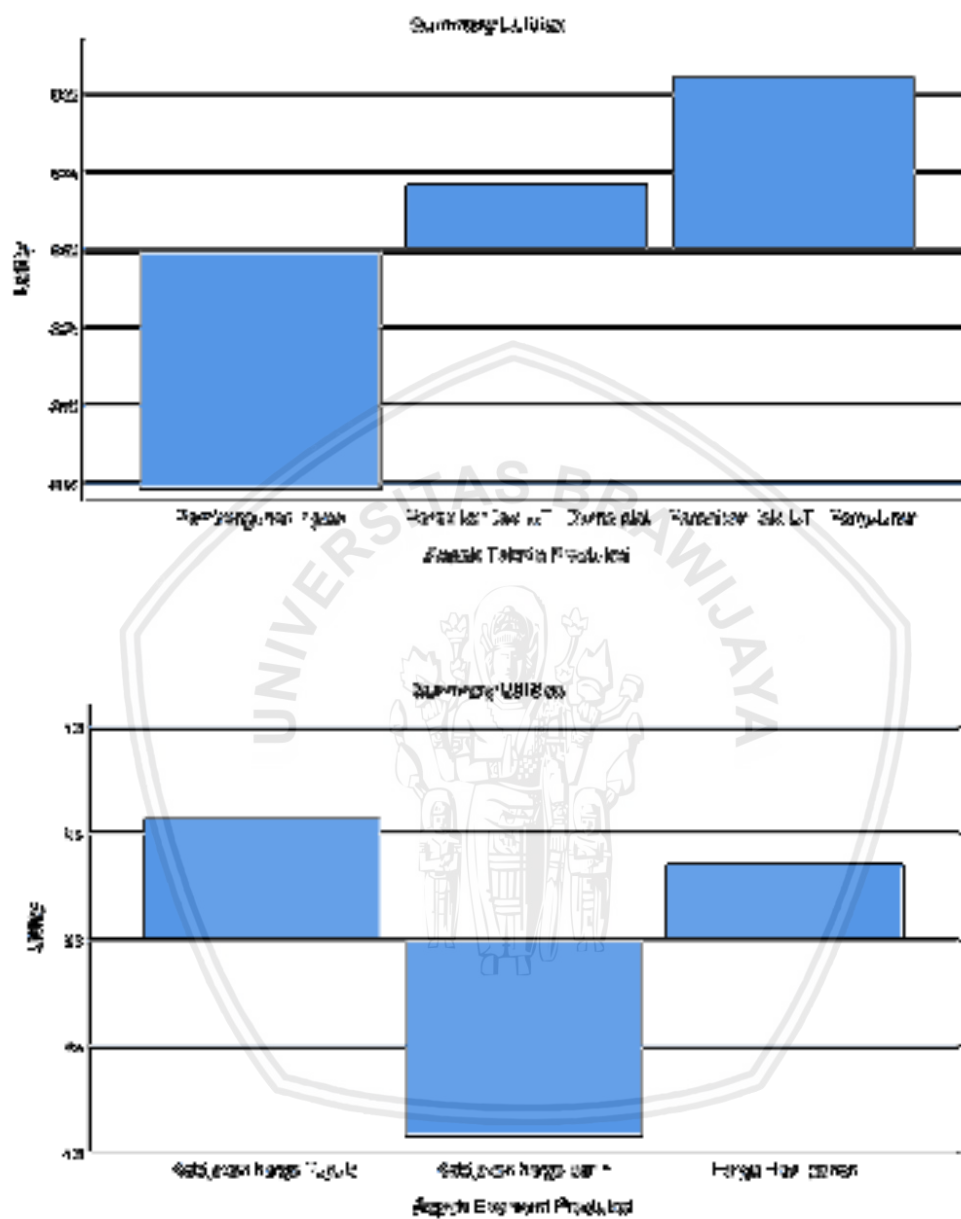
Lampiran 8. Hasil Analisis *Conjoint*

Korelasi antara *observed Variable* dan *estimated preferences*

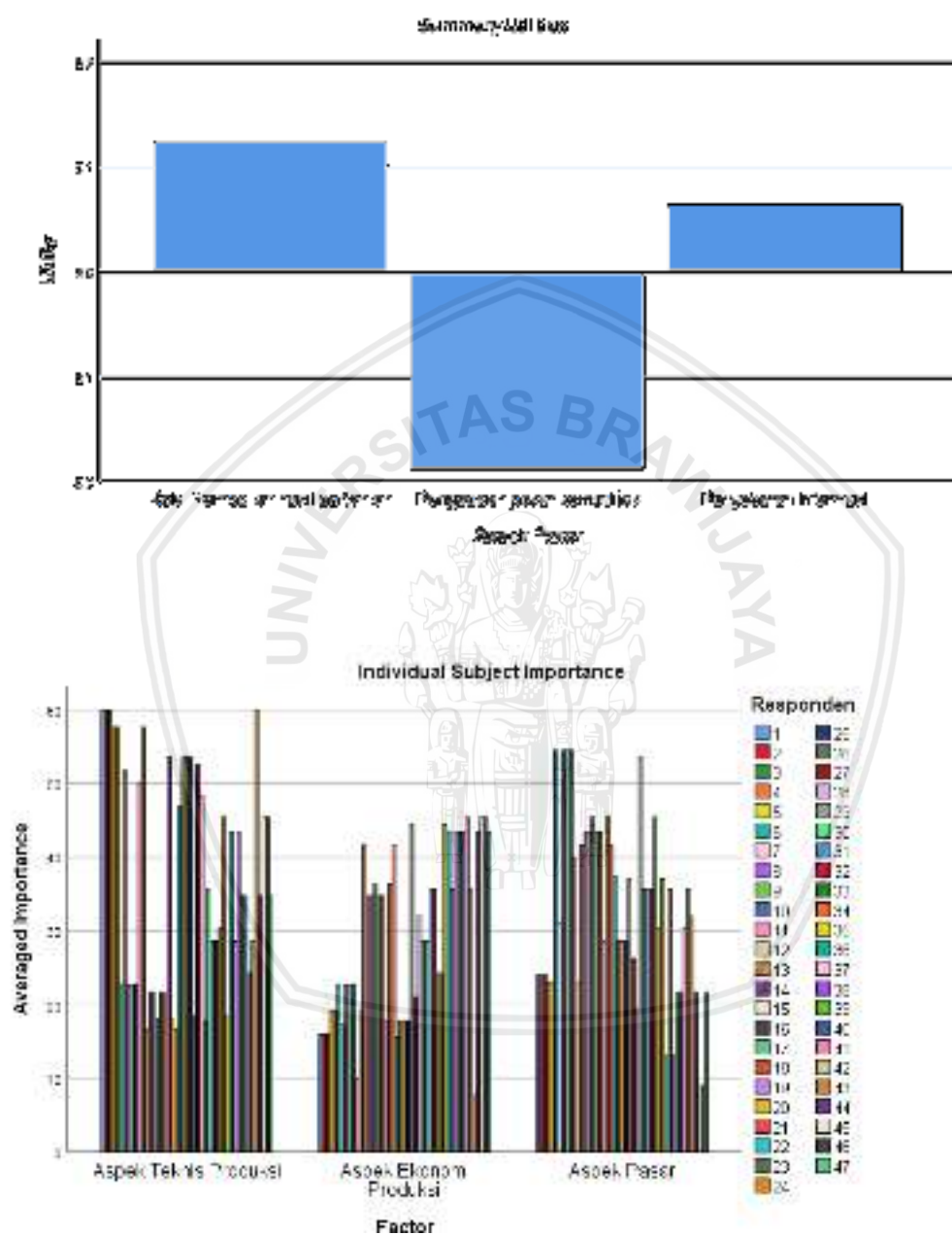
	Value	Sig.
Pearson's R	1.000	.
Kendall's tau	1.000	.000



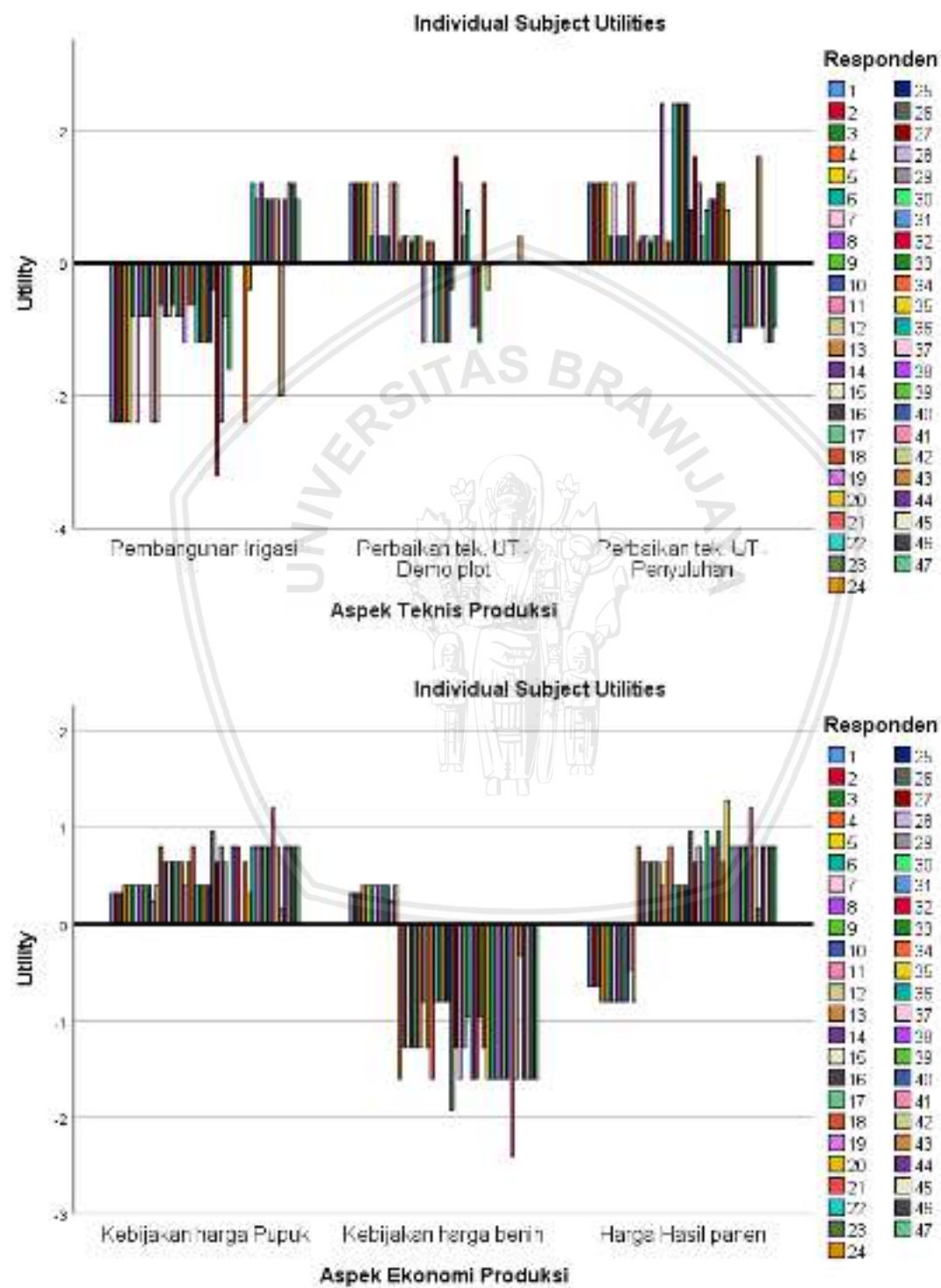
Lampiran 8. (Lanjutan)



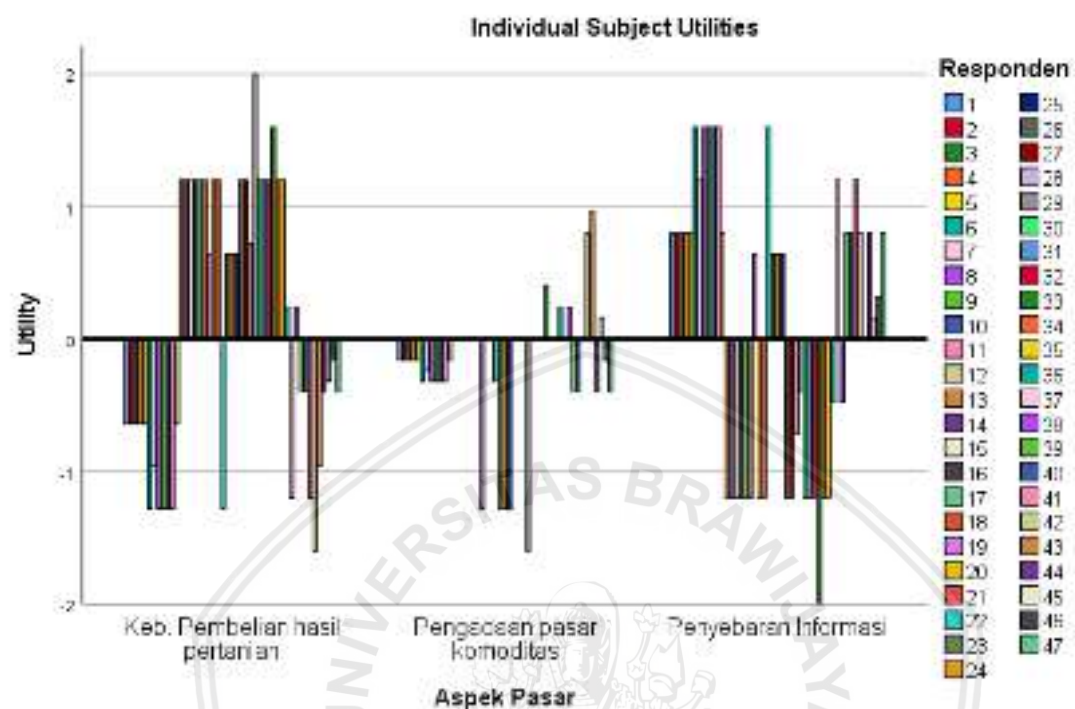
Lampiran 8. (Lanjutan)



Lampiran 8. (Lanjutan)



Lampiran 8. (Lanjutan)



Lampiran 9. Dokumentasi Penelitian



Dinas Pertanian dan Perkebunan Kediri



Wawancara Dengan Petani Cabai



Wawancara Dengan Petani Cabai



Kondisi Lahan Pertanian Cabai



Rumah Petani Cabai



Rumah Petani Cabai